



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan **TUNAI** dan **NONTUNAI**

Kajian di Tiga Kota



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

2017

KEPUASAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT TERHADAP BANTUAN TUNAI DAN NONTUNAI

Kajian di Tiga Kota



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

Jayaputra, Achmadi, dkk.

Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat terhadap Bantuan Tunai dan Nontunai: Kajian di Tiga Kota. Jakarta ; Jakarta 2017: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, viii + 76 halaman 14,5 x 21 cm

Konsultan:
Lidya Triana

Penulis:
Achmadi Jayaputra, Muhtar, M. Syawie
Bambang Pudjiyanto, Ayudiah Amalia,
M. Belanawane

Perwajahan:
Tim Peneliti

ISBN: 978-602-51581-0-0

Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial,
Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang II Jakarta Timur,
Telp. 021-8017146, Fax.021-8017126

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Kementerian Sosial secara bertahap melakukan kegiatan yang ditujukan kepada sasaran yang telah ditetapkan. Terutama bantuan sosial terhadap sekelompok orang yang masih memerlukan pangan. Tahun 2013 pemberian bantuan pangan secara tunai. Keluarga penerima manfaat dapat membeli beras bagi keluarga miskin dengan harga Rp 1.600,-/Kg. Mereka dapat membeli sesuai dengan kemampuannya. Biasanya beras tersedia di kantor kelurahan atau kantor desa setempat. Beras tersebut didatangkan dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Setiap orang yang memerlukan memperoleh ukuran yang pasti karena termasuk dalam data yang diterbitkan Kementerian Sosial.

Tahun 2017 dilakukan perubahan penyauran bahan pangan dengan sebutan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Keluarga penerima manfaat yang sudah terdata akan memperoleh bantuan pangan berupa beras, gulan, dan minyak goreng. Mereka akan menerima bahan pangan tersebut setara dengan Rp 110.000,-/bulan/keluarga. Bahan pangan diambil di warung yang sudah bekerjasama dengan perbankan, sehingga ada waktu pengambilan yang sesuai dengan jadwal setempat.

Keperluan tersebut, maka Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial melakukan penelitian tentang bantuan pangan tunai dan bantuan pangan nontunai di tiga kota yaitu: Palembang, Jogjakarta, dan Makassar. Beragamnya aspek yang perlu diungkap terkait dengan tujuan, manfaat, dan mekanisme kerja. Hal ini menunjukkan masih ada kegiatan yang perlu disempurnakan oleh unit operasional.

Semoga hasil penelitian tersebut sebagai bahan penyempurnaan program selanjutnya. Selamat membaca.

Jakarta, 2 Nopember 2017
Kapuslitbangkesos,

Mulia Jonie

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Metode	7
BAB II KONSEP	11
A. Bantuan Sosial	11
B. Kepuasan	12
C. Penelitian Terdahulu	19
BAB III LOKASI PENELITIAN	23
A. Palembang	23
1. Gambaran Umum	23
2. Kependudukan	24
3. Keluarga Penerima Manfaat	26
B. Yogyakarta	27
1. Gambaran Umum	27
2. Kependudukan	27
3. Penerima Manfaat	30
C. Makassar	31
1. Gambaran Umum	31
2. Kependudukan	32
3. Kondisi Kemiskinan Kota Makassar	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Respoden	39
1. Jenis Kelamin	39

2. Umur	39
3. Pekerjaan	41
4. Pendidikan	42
B. Informan	43
C. Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat	43
1. Tujuan	43
2. Manfaat	52
3. Prinsip Umum	56
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
1. Bantuan Tunai	65
2. Bantuan Nontunai	66
B. Rekomendasi	67
DAFTAR PUSTAKA	69
GALERI FOTO	73
BIODATA PENULIS	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Kemiskinan dan Penerima Bantuan Pangan di Kota Palembang, 2017	25
Tabel 2. Jumlah Pendudukan Provinsi DI Yogyakarta	28
Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta, 2014/2015.	29
Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin Kota Yogyakarta	30
Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Makassar 2014, 2015, dan 2016	33
Tabel 6. Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga menurut Kecamatan di Kota Makassar, 2016	34
Tabel 7. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Makassar, 2009-2016	36
Tabel 8. Jumlah Kepala Keluarga Miskin yang Menerima Raskin menurut Kecamatan di Kota Makassar, 2016	38
Tabel 9. Jenis Kelamin	39
Tabel 10. Umur Responden	40
Tabel 11. Pekerjaan Responden	41
Tabel 12. Pendidikan Terakhir Responden	42
Tabel 13. Bantuan Memenuhi Kebutuhan Pangan	44
Tabel 14. Bantuan Mengurangi Beban Pengeluaran Kebutuhan Pangan Rumah Tangga	46
Tabel 15. Bantuan Memenuhi Gizi Seimbang	47
Tabel 16. Kualitas Pangan Memenuhi Gizi Seimbang	48
Tabel 17. Bantuan Tepat Sasaran	49
Tabel 18. Bantuan Tepat Waktu	50
Tabel 19. Transaksi Kartu Lebih Mudah	53
Tabel 20. Jadwal Penyaluran Bantuan Jelas Waktunya	57
Tabel 21. Bahan Pangan Disalurkan Sesuai Jumlahnya	59
Tabel 22. Agen Menerima Usaha Eceran	62
Tabel 23. Bantuan Memberi kemudahan Transaksi Perbankan	63

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1. Kepuasan Tujuan	51
Grafik 2. Kepuasan Manfaat Bantuan Pangan Nontunai	55
Grafik 3. Kepuasan Prinsip Umum	56

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita dan bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan disepakati sebagai masalah yang bersifat sosial, ekonomi tetapi penyebab dan cara mengatasinya terkait dengan ideologi yang melandasinya. Menurut Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto; 2013; Sjafari; 2014).

A. Latar belakang

Menurut BPS (2016) pada bulan Maret 2017 jumlah penduduk miskin penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 %), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 %). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 7,73 %, turun menjadi 7,72 % pada Maret 2017. Sementara, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2016 sebesar 13,96 %, turun menjadi 13,93 % pada Maret 2017. Selama periode September 2016–Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang

dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017. Sementara, di daerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan yaitu; perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2017 tercatat sebesar 73,31 %. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2016 yaitu sebesar 73,19 %. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, kopi bubuk dan kopi instan (*sachet*), dan bawang merah. Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, angkutan, kesehatan, dan perlengkapan mandi.

Isu-isu sosial yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (*income inequality*) masih menjadi perhatian banyak negara dan organisasi kerjasama regional-multilateral seperti G20, OECD, the World Bank, IMF, ADB, dan ASEAN. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Forum G20 untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan disparitas pendapatan masyarakat adalah melalui sistem keuangan yang inklusif (*financial inclusion*). Dalam Leaders Summit di Los Cabos Meksiko pada tanggal 18 - 19 Juni 2012, G20 meluncurkan *Financial Peer Learning Program* (FPLP) dan *Global Partnership on Financial Inclusion* (GPII). Indonesia mulai meluncurkan strategi nasional

keuangan inklusif yang nantinya akan menjadi acuan dalam mensinergikan upaya perluasan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin kepada sektor keuangan formal sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek (Bank Indonesia, 2017).

Presiden Jokowi mengatakan indeks keuangan inklusif Indonesia masih sangat rendah yakni 36 persen. Terkait dengan hal tersebut, Presiden menekankan semua aparat agar memanfaatkan pelayanan keuangan inklusif. Termasuk dalam pemberian bantuan sosial atau bansos. Sehingga, bantuan sosial ke depannya tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif. Termasuk agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai, dengan menggunakan sistem perbankan. Kebijakan utama sebagaimana instruksi Presiden, bahwa semua bantuan harus disalurkan secara nontunai dan terpadu. Transisi penyaluran bantuan ke non tunai juga perlu pengawasan lebih baik. Saat ini, sejumlah program yang dijadikan maskot untuk menurunkan kemiskinan, antara lain, perluasan konversi beras sejahtera jadi layanan non tunai di semua kota dan sebagian Kabupaten (Kompas, 2017). Satu diantaranya keuangan inklusif dalam program Bantuan Pangan

Nontunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di Warong-e KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Himbara. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Bantuan Pangan Nontunai yang saat ini menasar 1,28 juta juga bertambah menjadi 10 juta KPM. Seluruhnya akan disalurkan secara non tunai dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himpunan Bank Negara yaitu: BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Menteri Sosial RI berpendapat, apa yang dilakukan pemerintah melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia. Bukan tanpa alasan, mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin.

Masih rendahnya literasi layanan perbankan, perlu dilakukan edukasi terus menerus kepada para penerima manfaat. Edukasi tidak hanya soal bagaimana cara mengambil uang lewat kartu elektronik, tapi juga tentang kegunaan rekening, produk perbankan, perencanaan keuangan keluarga, manfaat menabung, dan lain sebagainya, termasuk berbagai risiko yang mungkin terjadi. Tahun 2016 tingkat literasi Indonesia terhadap bidang layanan keuangan hanya mencapai 29,66 %. Artinya dari 100 orang hanya 29 orang yang paham dan mengerti layanan keuangan. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. Melalui peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan

dengan bantuan non tunai berbentuk kepemilikan rekening melalui kartu ATM yaitu Kartu Keluarga Sejahtera disertai buku tabungan (Nusantaranews, 2017).

B. Permasalahan

Seperti yang telah disebutkan Bantuan Sosial Tunai banyak menimbulkan kendala dan permasalahan. Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai merupakan penerapan strategi nasional keuangan inklusif. Keuangan inklusif membuat penduduk, khususnya kelompok masyarakat miskin terhubung dengan peluang ekonomi. Minimnya akses pada layanan jasa keuangan membatasi kemampuan seseorang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Banyak manfaat sosial yang diperoleh jika bantuan sosial disalurkan secara nontunai. Selain meningkatkan taraf hidup dan aksesibilitas lembaga keuangan, masyarakat juga diajarkan untuk menabung. Tahun 2017 ditargetkan sebanyak 3 juta KPM melalui PKH di 98 Kota dan 200 kabupaten akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini. Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima BPNT (Societa, 2017).

Hal ini sebagai satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Bahkan Kementerian PAN RB mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penghargaan bagi instansi pemerintah yang melakukan pengembangan dan Inovasi Pelayanan Publik. Untuk itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara

berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan **Survei Kepuasan Masyarakat** bagi instansi penyelenggara pelayanan publik. *Survei Kepuasan Masyarakat* diatur dalam peraturan Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah namun dikarenakan belum mengacu kepada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan perlu adanya keselarasan dengan Standar Pelayanan maka diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kepuasan KPM terhadap BPNT dan kepuasan terhadap program sebelumnya. Pertanyaan kajian cepat ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepuasan Keluarga Penerima Manfaat terhadap manfaat Bantuan Pangan Tunai dan Bantuan Pangan Nontunai?
2. Bagaimana kepuasan Keluarga Penerima Manfaat terhadap tujuan Bantuan Pangan Tunai dan Bantuan Pangan Nontunai?
3. Bagaimana kepuasan Keluarga Penerima Manfaat terhadap mekanisme Bantuan Pangan Tunai dan Bantuan Pangan Nontunai?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan pertanyaan kajian tersebut, kajian cepat ini bertujuan mendeskripsikan:

1. Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat terhadap manfaat

- Bantuan Pangan Tunai dan Bantuan Pangan Nontunai,
2. Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat terhadap tujuan Bantuan Pangan Tunai dan Bantuan Pangan Nontunai,
 3. Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat terhadap mekanisme Bantuan Pangan Tunai dan Bantuan Pangan Nontunai.

Manfaat secara praktis hasil kajian ini dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam perbaikan pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai. Secara akademis dapat memperkaya upaya penanganan kemiskinan di Indonesia secara nontunai.

D. Metode

1. Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif sebagai upaya memahami dan menggambarkan objeknya. Pendekatan yang dilakukan secara kuantitatif dengan menampilkan data yang terkumpul dari sasaran utama yaitu keterangan berdasarkan kuesioner dari penerima manfaat. Data tersebut ditunjang dengan pendekatan kualitatif berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui diskusi kelompok terarah dan diskusi dengan instansi sosial atau instansi terkait lainnya.

2. Lokasi

Pemilihan lokasi berdasarkan keterwakilan wilayah Indonesia; timur, tengah, dan barat. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, telah dilakukan kegiatan penyaluran bahan pangan nontunai di 44 kota. Keperluan penelitian hanya terhadap kota tertentu yang menunjukkan keterwakilan wilayah Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Oleh karena itu secara acak (*random*) dipilih tiga kota yaitu: Palembang mewakili kota Indonesia bagian barat, Jogjakarta mewakili

kota Indonesia bagian tengah, dan Makassar mewakili kota bagian timur.

Kemudian dari masing-masing kota dipilih satu kecamatan yang terbanyak menerima bantuan pangan nontunai. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, maka secara acak terhadap satu atau beberapa kelurahan untuk menetapkan responden sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

3. Responden dan Informan

Responden dipilih secara acak terhadap penerima manfaat dengan syarat bahwa mereka pernah menerima penyaluran bahan pangan secara tunai dan sekarang menerima bahan pangan secara nontunai. Responden sebagai sasaran penelitian ini 50 orang tiap satu kecamatan dan ada juga dari beberapa kelurahan dalam kecamatan yang sama. Sebagian besar mereka diundang di tempat yang telah ditentukan seperti di kantor kelurahan dan musholla. Mereka akan mengisi kuestioner yang telah disiapkan tim peneliti dengan sebanyak 16 pernyataan untuk bantuan pangan tunai dan bantuan pangan nontunai. Tim peneliti dibantu dengan pendamping yang merangkap sebagai pembantu peneliti ikut mewawancarai keluarga penerima manfaat dalam mengisi instrumen. Beberapa diantaranya didatangi dengan maksud sekaligus mengamati situasi dan kondisi kehidupan dalam keluarga, tetangga, dan lingkungannya.

Informan yang diperlukan dalam upaya memahami tentang pelaksanaan dan kondisi penerima manfaat. Informan jumlahnya paling sedikit tiga orang dan mereka dipilih secara sengaja dengan ketentuan tokoh masyarakat

yang mengetahui pelaksanaan penyaluran bahan pangan di lingkungan tempat tinggalnya. Diantaranya yaitu: Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Ketua Tukun Tetangga, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan agen penyalur bahan pangan.

Beberapa responden dan informan dipilih untuk mengikuti kegiatan diskusi kelompok terarah. Jumlah peserta diskusi 10 - 15 orang. Sebagai moderator ditetapkan seorang pegawai dari Dinas Sosial kota atau tokoh masyarakat setempat. Tempat diskusi kelompok diperoleh keterangan berlangsung di kantor kelurahan dan musholla. Sebab di lokasi tidak ada tempat yang sesuai dengan keperluan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu; studi dokumentasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan pengamatan. Studi dokumentasi dilakukan dengan membaca pedoman, buku dan hasil penelitian terdahulu. Studi dokumentasi masih terbatas pada keterangan yang memuat tentang pedoman pelaksanaan penyaluran bahan pangan dan buku-buku terkait dengan penelitian. Dokumentasi lain yang diperoleh hanya berupa data penerima bantuan pangan nontunai, berita koran dan internet.

Wawancara disiapkan berupa pedoman wawancara yang digunakan dalam diskusi kelompok dengan informan. Materi yang sama sebagai bagian dalam menggali berbagai keterangan dari informan yang diperlukan dari tokoh masyarakat dan responden tertentu. Wawancara dilakukan sambil lalu tentang penyaluran bantuan bahan pangan, sehingga waktunya tidak terbatas selama berada di lokasi penelitian.

Diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion* = FGD) dilaksanakan di satu tempat yang ditentukan dengan mengundang 10 - 15 orang sebagai peserta diskusi. Mereka terdiri dari: beberapa penerima bahan pangan tunai dan nontunai, tokoh masyarakat, dan petugas yang membantu keluarga penerima manfaat. Pelaksanaan diskusi kelompok ini dipandu dengan pedoman diskusi kelompok. Disiapkan instrumen B dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kepuasan terhadap bantuan pangan tunai dan bantuan pangan nontunai.

Pengamatan dilakukan langsung dengan melihat lokasi pembagian bantuan, kondisi sosial penerima bantuan, dan lingkungan lokasi. Secara kebetulan ada beberapa tempat dapat mengamati penyaluran bantuan bahan pangan nontunai. Penerima bahan pangan masih antri dalam pengambilan, sehingga diperlukan waktu dalam pembagian bahan pangan.

5. Organisasi

Pelaksanaan kajian selama dua bulan, dimulai dengan diskusi awal Oktober 2017 dan dilanjutkan dengan pengumpulan data selama satu minggu. Penyusunan laporan sementara melalui paparan hasil kajian dan diskusi.

Penanggung Jawab	: Kepala Puslitbangkesos
Narasumber	: Lidya Triana
Ketua Tim	: Achmadi Jayaputra
Peneliti	: Muhtar M. Syawie Bambang Pudjianto Ayudiah Amalia M. Belanawane
Pendamping	: Tiga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Tiga Pendamping Program Keluarga Harapan

BAB II KONSEP

Konsep yang diuraikan beberapa pengertian yang menunjang pelaksanaan kegiatan tentang bantuan sosial, kepuasan, bantuan pangan, dan hasil penelitian lain.

A. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial (*Social Assistance*). Bantuan sosial atau yang kerap disebut juga dengan bantuan publik dan pelayanan kesejahteraan mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang ditujukan untuk membantu atau melindungi individu, keluarga dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Program-program bantuan sosial mencakup berbagai jenis tindakan publik yang didesain untuk mentransfer sumber-sumber kepada orang-orang yang memenuhi syarat, yakni mereka yang lemah dan rentan seperti anak-anak, korban perang atau korban bencana alam atau bencana sosial, dan orang dengan kecacatan. Mereka memiliki hak-hak sosial yang wajib dipenuhi negara terlepas dari ketidakmampuannya memberi kontribusi premi.

Bentuk-bentuk bantuan sosial dapat berupa (Suharto, Edi, 2009):

1. Transfer uang atau barang seperti Bantuan Langsung Tunai, kupon makanan atau pemberian kursi roda, tongkat dan komputer braile bagi penyandang cacat atau ODKK,
2. Pelayanan sosial atau kesejahteraan yang berupa konseling, penyuluhan atau program seperti Bantuan Operasional

Sekolah atau Program Keluarga Harapan yang memadukan transfer uang (peningkatan daya beli) dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan,

3. Subsidi temporer, seperti Program Raskin, minyak tanah bersubsidi, bantuan uang muka atau perumahan, penjualan sembako murah di masa krisis,
4. Skema 'pengaman sosial' yakni pengaman (*safeguard*) yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan menyusul adanya dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.

Bantuan sosial terhadap kelompok orang miskin dalam bentuk bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Awalnya, tahun 1999 setiap keluarga yang tergolong miskin dapat membeli beras seharga Rp 1.600,-/Kg dengan jatah 10 Kg/keluarga, tetapi ada juga yang dijual lebih tinggi sampai dengan Rp 2.000,-/Kg. Keluarga boleh membeli beras sesuai dengan kemampuannya. Selisih harga yang lebih banyak dibandingkan dengan harga pasaran ditanggung Kementerian Sosial. Saat ini penerima bantuan bahan pangan tidak lagi membeli, melainkan menggunakan kartu kombo yang didalamnya berisi uang Rp 110.000,-/bulan/keluarga untuk membeli tiga bahan pangan yaitu; beras, gula, dan minyak goreng.

B. Kepuasan

Menurut Kotler. et.al. (1996), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan harapannya. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan merupakan suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila suatu pelayanan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dengan demikian kepuasan pelanggan merupakan elemen penting

dalam penyediaan suatu pelayanan yang lebih baik, efisien, dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dipastikan tidak efektif dan tidak efisien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik. Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masadan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka survei kepuasan dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat dalam peraturan ini meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan

kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil atas Survei Kepuasan Masyarakat tidak harus disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut, tetapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif secara baik atau buruk. Hal yang menjadi perhatian utama atas hasil survei tersebut, adalah harus ada saran perbaikan dari pemberi layanan yang disurvei terhadap peningkatan kualitas layanan. Penjelangan selanjutnya, bahwa hasil survei tentang kepuasan masyarakat yang mengalami pelayanan publik wajib diinformasikan kepada publik termasuk metode survei. Penyampaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat disampaikan melalui media massa, *website* dan media sosial.

Terkait dengan penelitian tentang bantuan pangan terhadap keluarga penerima manfaat hampir sejalan dengan survei diatas, maka hasil penelitian akan disampaikan secara umum melalui media resmi untuk diketahui bersama tentang pelaksanaannya di lapangan. Hanya dibatasi pada tiga aspek yaitu; tujuan, manfaat, dan mekanisme.

5. Bantuan Pangan

Bantuan pangan terhadap keluarga miskin dimulai tahun 1998 sebagai langkah dalam menghadapi dampak krisis moneter dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK). Bantuan pangan berupa beras sebagai Jaring Pengaman Sosial dalam jangka pendek menghadapi krisis ekonomi. Beras yang dijual untuk keluarga miskin dengan harga murah Rp 1.000,-/Kg yang

harus dibeli secara tunai sesuai kemampuan dengan jatah 10 Kg - 20 Kg/bulan. Beras tersebut lebih dikenal dengan sebutan beras miskin atau raskin. Tahun 2002 diganti dengan sebutan beras untuk keluarga sejahtera atau rastra. Tahun 2006 dan 2007 ditetapkan 10 Kg/keluarga/bulan selama satu tahun. Tahun 2008 harga beras menjadi paling rendah Rp 1.600,-/Kg dan tertinggi ada yang sampai Rp 2.000,-/Kg. Rastra dirasakan manfaatnya antara lain peningkatan ketahanan pangan di rumah tangga sasaran dan sekaligus mekanisme perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan (Elly Kuntjorowati; 2015: 16, 101).

Bantuan Pangan Nontunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di Warong-e KUBe PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Himbara. Bantuan Pangan Nontunai bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Program Bantuan Pangan Nontunai merupakan transformasi Program Subsidi Rastra, yang dilaksanakan sesuai dengan Arahan Presiden RI untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Secara khusus, Bantuan Pangan Nontunai juga bertujuan untuk memberikan pilihan bahan pangan yang lebih luas selain beras dengan nutrisi yang lebih seimbang dan memberikan akses pada layanan keuangan untuk mendorong perilaku produktif dan akumulasi aset bagi penerima bantuan. Dalam rangka mendukung upaya sebagaimana dimaksud, bantuan pangan disalurkan secara non tunai

dengan menggunakan sistem perbankan, agar dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan untuk mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.

Sebagai upaya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai, dengan menggunakan sistem perbankan.

Tujuan BPNT adalah;

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM.
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Manfaat BPNT adalah;

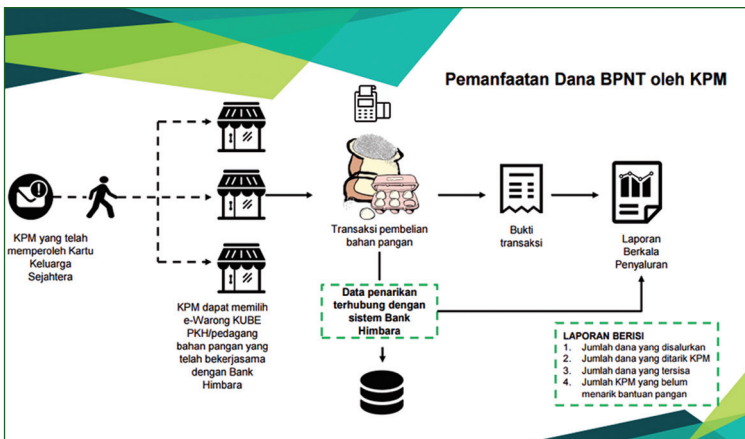
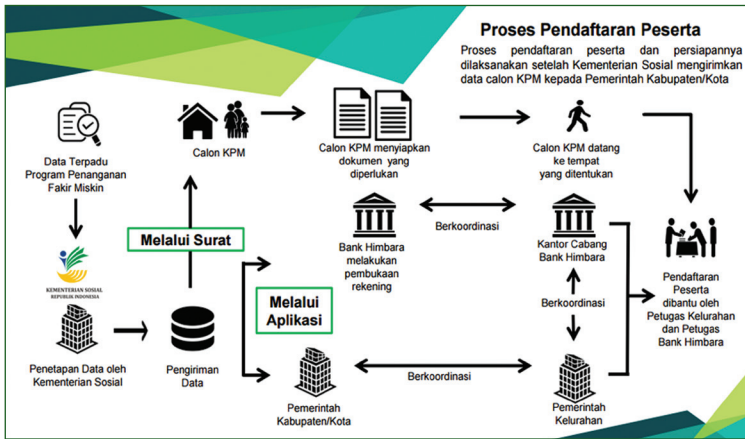
1. Meningkatkannya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda GNNT.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan SNKI.
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Prinsip Umum BPNT adalah;

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
3. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan dengan preferensi.
4. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM.
5. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM.

Secara prinsip penyaluran bantuan pangan nontunai harus melalui mekanisme yang telah disusun dalam pedoman pelaksanaannya. Secara garis besarnya terdiri dari tiga tahap yaitu; persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan. Tahap persiapan antara lain pendataan dalam menentukan keluarga penerima manfaat yang akan diputuskan oleh suatu tim yang terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga. Penetapannya dalam bentuk keputusan Menteri Sosial RI. Data tersebut dikirim ke bank yang ditunjuk dan Prum Bulog sebagai penyalur bahan pangan. Tahap pelaksanaan yaitu keluarga penerima manfaat mengambil bantuan pangan pada agen bank atau Warong-e KUBe PKH yang ditunjuk. Tahap pemantauan, kembali dilakukan oleh tim pelaksana dengan mengikutsertakan Dinas Sosial Provinsi, dan Kabupaten/Kota setempat. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahan pangan sampai ke sasaran.

Mekanisme BPNT



C. Penelitian Terdahulu

Penelitian Elly Kuntjorowati (2014), bahwa Rumah Tangga Sasaran (RTS) puas karena membantu pengeluaran untuk membeli beras dan memenuhi gizi, dan puas karena harga bahan pangan murah. Faktor pendukung, bahwa beras

merupakan bahan pokok dengan harga murah atau terjangkau, dan petugasnya melayani. Faktor penghambat; jadwal pembagian yang tidak tepat waktu, dan mengeluarkan ongkos angkut bahan pangan.

Penelitian Anwar Sitepu dan kawan-kawan (2014: 77 - 78) tentang evaluasi implementasi kebijakan beras miskin. Hasil penelitian beras bagi masyarakat miskin, bahwa kebijakan program Raskin belum dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Raskin didistribusikan tidak hanya kepada rumah tangga yang terdaftar dalam Basis data Terpadu seperti yang ditetapkan. Jumlah dan kualitas raskin belum sesuai seperti direncanakan. Kendala yang dihadapi tiga hal yaitu; kesalahan penetapan sasaran diantaranya basis data yang digunakan belum akurat, Tim Koordinasi pelaksana (Tikorlak) Raskin belum efektif bekerja menyelesaikan permasalahan yang muncul dan KPS tidak efektif, dan secara nasional alokasi anggaran untuk subsidi beras belum memadai. Konsekuensinya fungsi perlindungan sosial Raskin relatif masih sangat lemah, belum memadai untuk melindungi rumah tangga miskin dan rentan dari resiko.

Penelitian Anwar Sitepu (2017: 56 - 58) tentang BPNT dengan lokasi Kota Tangerang dan Jakarta Barat. Kesimpulannya, bahwa perubahan kebijakan Raskin menjadi BPNT dapat meningkatkan efektivitas program. Indikator keberhasilan program yang disebut enam tepat secara administrasi relatif dicapai lebih baik. Secara psikologis masyarakat berpenghasilan rendah menerima bantuan pangan jauh lebih menikmati sistem baru dibandingkan dengan sistem terdahulu. Melalui mekanisme pengadaan bahan pangan ada sejumlah hal positif yaitu: terakomodasinya bahan pangan lokal, menghidupkan atau menggairahkan ekonomi

lokal, memperpendek jalur perdagangan, berkembangnya kemampuan bisnis terbawah. Hanya ketepatan waktu belum dicapai, masalahnya bersumber pendataan yang diatur diluar BPNT.

Keterangan yang diterbitkan Biro Perencanaan Kementerian Sosial (2017) di Kota Denpasar, bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan pangan belum sesuai dengan Pedoman Umum BPNT karena tidak satu persepsi antara Kementerian Sosial dengan Himbara diantaranya penyaluran harus diambil habis, komoditi hanya beras dan gula. Pada Bulog terjadi dua kali kenaikan, tanggal 19 Agustus 2017 beras Rp 8.300,-/Kg dan tanggal 22 Agustus 2017 naik Rp 9.000,-/Kg, dan berikutnya naik menjadi Rp 9.500,-/Kg.

Permasalahan;

1. Ketidak siapan pihak Bulog terjadi keterlambatan pengiriman bahan pangan ke lokasi, akibatnya jadwal penyaluran mundur.
2. Pihak bank membolehkan hanya dua bahan pangan yaitu beras dan gula yang harus diambil habis untuk kuota enam bulan dari Maret sampai dengan Agustus 2017. Keterangan BTN Pusat dana tahap keempat belum ditransfer oleh BNI. Beberapa KPM saldonya Rp 0,- atau ter-*block* oleh pihak bank, sehingga tahap kedua hilang dan di Kecamatan Denpasar Utara belum terlaksana.

Penelitian Muhtar dan kawan-kawan (2017) tentang Warong-e KUBe PKH sebagai penyaluran bahan pangan tiga kota di; Pekanbaru, Bandar Lampung, dan Semarang. Hasil penelitian menyebutkan, mulai tahun 2016 penyaluran bahan pangan melalui Warong-e KUBe PKH yang bekerja sama dengan bank pemerintah sebagai pembayar bahan pangan dan Perum Bulog sebagai penyalur bahan pangan nontunai.

Tiap Warong-e KUBE PKH menyediakan bahan pangan yang diperlukan penerima manfaat, mereka melakukan pembelian bahan pangan secara nontunai sesuai dengan bahan pangan yang diinginkan. Hasil penelitian tentang Warong-e KUBE PKH menunjukkan, bahwa keluarga penerima manfaat menyatakan puas (80,70 %), dan sangat puas (17,3 %), dan kurang puas hanya dua persen.

Kajian yang hampir sama (Biro Perencanaan; 2017) di Provinsi Lampung yaitu:

1. Kota Bandar Lampung baru dibuka 14 warong-elektronik. Masalah yang muncul antara lain; mesin EDC cepat rusak karena digunakan untuk ribuan KPM, adanya kelambatan pengiriman dana dari BRI ke ATM KPM, sehingga belum bisa mengambil bahan pangan dan padahal sudah di debit. Khusus di Warong-e Sumber Raya masalahnya; ada beberapa kartu e-wallet yang kosong, pendamping/penyelia belum mendapat pelatihan kapasitas pendamping.
2. Kabupaten Pesawaran, telah menyiapkan data calon penerima bahan pangan menjadi 23.813 KPM. Sudah diajukan 21 lokasi di 11 kecamatan dan akan bekerjasama dengan Bank Mandiri. Masih perlu verifikasi ulang untuk kelayakan penetapan penerima bantuan.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian menguraikan tentang gambaran umum tiga kota. Dimaksudkan sebagai mengaitkan data dan keterangan yang diperoleh dari sumber tertulis terkait dengan tema penelitian.

A. Palembang

1. Gambaran Umum

Kota Palembang memiliki luas wilayah 358,55 Km² yang dihuni 1,8 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per Km². Ketinggian rata-rata delapan meter diatas permukaan laut, tanahnya relatif datar dan rendah. Tempat yang tinggi terletak di bagian utara, bagian selatan agak rendah dan sering digenangi air. Kota ini dialiri Sungai Musi sepanjang 750 Km dan merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang bermuara ke Selat bangka. Sungai Musi membelah Kota Palembang menjadi dua yaitu: Seberang Ilir dan Seberang Ulu. Air Sungai Musi berasal dari sekitar 60 sungai kecil yang berasal dari pedalaman, diantaranya terbesar yaitu; di bagian timur Sungai Ogan dan bagian barat Sungai Belida. Sejak dahulu sampai sekarang sungai tersebut menjadi alur lalu lintas sungai yang ramai menghubungkan daerah pantai dengan daerah pedalaman. Diatas sungai tersebut terbentang dua jembatan: Musi Satu, dan Jembatan Ampera. Jembatan Musi Satu merupakan jembatan yang dibangun pada tahun 1935 oleh pemerintah Belanda dengan menggunakan dana bersumber dari cukai atau pajak petani karet. Jembatan Ampera dibangun tahun 1962 sebagai jembatan megah sepanjang 1.177 meter. Pembangunannya menggunakan harta rampasan Jepang

(Wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang, 2017).

Secara administratif Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan dan 107 desa/kelurahan. Kota air langsung berbatasan dengan tiga kabupaten sekitarnya. Batas wilayah yaitu; bagian utara, timur, dan berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim. Kondisi alam sedemikian rupa sangat mempengaruhi lingkungan hidup warganya, terutama aspek mobilitas yang tinggi antar kabupaten dan mata pencaharian terkait dengan kondisi alam sebagai petani tanaman keras dan jasa sungai.

2. Kependudukan

Secara administrasi tercatat; tahun 2010 berjumlah 1.468.007 jiwa, tahun 2014 sebanyak 1.558.494 jiwa, dan tahun 2015 menjadi 1.580.517 jiwa. Jumlah penduduk Kota Palembang tiap tahun mengalami pertambahan sekitar 1,61 % disebabkan tingginya perpindahan penduduk dari desa ke kota dan kelahiran (palembangkota.bps.go.id, 2016).

Dilihat dari asal usulnya, penduduk Kota Palembang merupakan etnis Melayu dan menggunakan dialek bahasa Palembang. Banyak juga pendatang dari kabupaten di sekitar kota tersebut atau pendatang dari luar Provinsi Sumatera Selatan. Warga pendatang dan keturunan yang banyak seperti; Jawa, Minangkabau, Batak, Banjar, Bugis dan Makassar, serta keturunan Tionghoa atau Cina, Arab dan India. Ciri khas lainnya dari komunitas Tionghoa banyak yang tinggal di Kampung Kapitan. Sedangkan keturunan komunitas Arab banyak tinggal di Kampung Al Munawar, Kampung Assegaf, Kampung Jamalullail, dan Kampung Al Habsy (Kotapalembang-wikipediabahasaindonesia, 2017).

Berdasarkan sensus tahun 2015, diketahui penduduk Kota Palembang sebagai penganut agama: Islam (91,93 %), Budha (3,46 %), Kristen protestan (2,87 %), Katholik (1,65 %), Hindu (0,08 %), dan Konghucu (0,01 %). Kehidupan sehari-hari, mereka saling berhubungan secara harmonis karena diantara pemeluk agama tersebut terdapat kesamaan dalam mata pencaharian hidup dan khususnya perdagangan dan makanan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Kemiskinan dan Penerima Bantuan Pangan di Kota Palembang, 2017

No	Kecamatan	Penduduk	Miskin	PKH	Rastra	Jumlah
1	Alang-alang Lebar	105.168	3.392	812	1.082	1.894
2	Bukit Kecil	43.967	2.840	980	875	1.765
3	Gandus	62.146	6.493	1.767	3.734	5.501
4	Ilir Timur I	71.418	4.553	1.232	1.433	2.665
5	Ilir Timur II	165.238	9.549	1.591	3.960	5.551
6	Ilir Barat I	135.385	7.350	1.809	2.480	4.289
7	Ilir Barat II	65.991	5.616	1.283	2.888	4.171
8	Kemuning	85.002	5.253	1.114	1.795	2.909
9	Kertapati	84.698	13.239	3.412	6.447	9.859
10	Kolidoni	110.982	6.219	1.847	2.381	4.228
11	Seberang Ulu I	176.749	17.916	7.118	6.472	13.590
12	Seberang Ulu II	99.222	9.764	1.551	5.567	7.108
13	Plaju	81.891	8.454	1.360	4.886	6.246
14	Sako	91.087	5.624	1.057	1.885	2.942
15	Sematang Borang	37.434	3.063	693	1.049	1.742
16	Sukarami	164.139	7.187	2.330	2.606	4.936
Kota Palembang		1.580.517	116.512	29.856	49.540	79.396

Sumber: Diolah dari BPS Kota Kota Palembang (2017), Data KPM BPNT

Menyimak tabel diatas masih ada warga palembang yang tergolong sebagai keluarga miskin yang tersebar dalam beberapa kecamatan. Dua tahun terakhir tercatat keluarga

miskin yaitu: tahun 2015 sebanyak 12,85 %, tahun 2016 sebanyak 14.280 jiwa (12,73 %) dan tahun 2017 sekitar 12,45 %. Disebut miskin mereka banyak yang berpenghasilan kurang dari Rp 350.000,-/bulan, ada juga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan pengangguran.

3. Keluarga Penerima Manfaat

Berdasarkan data PPLS 2011 (BPS, 2015) penduduk Kota Palembang yang termasuk dalam kategori miskin mencapai 224.300 jiwa atau 116.512 KK. Jumlah tersebut meningkat 0,15 % dari tahun sebelumnya 218.600 jiwa. Kategori sangat miskin berjumlah 15.396 KK, terbanyak di Kecamatan Kertapati sebanyak 3.467 KK, Kecamatan Seberang Ulu I ada 2.762 KK, dan Kecamatan Seberang Ulu II ada 1.058 KK. Kemiskinan tersebut disebabkan antara lain: terbatasnya sarana yang dimiliki keluarga, kurangnya potensi diri warga, dan bertambahnya pendatang baru yang tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan tetap.

Oleh karena itu masih banyak keluarga miskin yang belum mendapat bantuan pangan. Tahun 2007 tercatat 99.396 KK (17,86 %) memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT), mereka menggunakan bantuan untuk berbagai keperluan dalam menanggulangi kemiskinan. Dilihat dari Tabel 1 diatas, bahan pangan yang disalurkan kepada keluarga miskin hanya ditujukan kepada penerima manfaat yang sejak dahulu menerima beras miskin (62,540 %) dan dilanjutkan dalam Bantuan Pangan Nontunai. Sebagian lagi diperuntukkan keluarga yang menerima PKH (37,60 %).

B. Yogyakarta

1. Gambaran Umum

Kota Yogyakarta luas wilayahnya 32,5 Km² atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 Km. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0-2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari Permukaan Air Laut (DPA). Terdapat tiga sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu: Sungai Gajah wong yang mengalir di bagian timur, Sungai Code di bagian tengah, dan Sungai Winongo di bagian barat.

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur dengan Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan dengan Kabupaten Bantul, dan sebelah barat dengan Kabupaten Bantul dan Sleman

2. Kependudukan

Secara umum penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari penduduk setempat dan penduduk pendatang. Penduduk setempat dimaksudkan mereka yang lahir atau besar di wilayah provinsi tersebut, bahasa Jawa sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari dalam pergaulan dengan tetangga atau sekampung. Sedangkan penduduk pendatang dimaksudkan mereka yang berasal dari luar provinsi tersebut dan ada juga yang berasal dari luar provinsi tersebut. Penduduk pendatang ada yang tercatat sebagai penduduk

kota tersebut yang disebabkan perkawinan dengan penduduk setempat dan orang yang pindah dari kota lain.

Penduduk yang tinggal di provinsi ini tiap tahun mengalami penambahan. Kondisi tersebut tergambar dalam Tabel B1. Berdasarkan data kabupaten, pendudukan terbanyak di Kabupaten Sleman dari tahun 2011 jumlahnya 1.116.184 jiwa dan tahun 2015 menjadi 1.167,481 jiwa. Dibandingkan dengan penduduk di kabupaten lain jumlahnya kurang satu juta jiwa. Sedangkan penduduk yang terkecil jumlahnya yaitu Kota Yogyakarta ditandai tahun 2011 berjumlah 392.506 dan tahun 2015 berjumlah 412.704 jiwa. Beberapa keterangan yang diperoleh antara lain kelahiran yang diperkirakan dengan bertambahnya anggota keluarga baru dalam keluarga ini. Selain itu ada kasus tertentu. Misalnya ada penduduk yang semula berasal dari kota tersebut dan pergi merantau, lalu kembali ke kampung halamannya menjadi penduduk setempat.

Tabel 2. Jumlah Pendudukan Provinsi DI Yogyakarta

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta					
Kabupaten/Kota	2015	2014	2013	2012	2011
D.I. Yogyakarta	3679176	3637116	3594854	3552462	3509997
Kulonprogo	412198	407709	403179	398672	394200
Bantul	971511	959445	947072	934674	922104
Gunungkidul	715282	707794	700191	692579	685003
Sleman	1167481	1154501	1141733	1128943	1116184
Yogyakarta	412704	407667	402679	397594	392506

Sumber: BPS DI Yogyakarta, 2015. <http://yogyakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/70>

Kondisi kemiskinan Kota Yogyakarta memperlihatkan secara merata di provinsi ini sekitar 14,55 %. Sedangkan wilayah termiskin di Gunungkidul dengan angka kemiskinan tertinggi mencapai 20, 83 % dari jumlah penduduk yang ada. Khusus Kota Yogyakarta sekitar 8,67 %, ini merupakan jumlah terkecil diantara kabupaten lainnya di provinsi yang mempunyai keistimewaan tersebut.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta, 2014/2015.

	Kabupaten/Kota/ <i>Regency/City</i>	Garis Kemiskinan/ <i>Poverty Line</i> (Rp/ kap/bulan Rp/cap/ <i>month</i>)	Penduduk Miskin/ <i>Poor People</i>	
			Jumlah/ Total	%
1	Kulonprogo	265 575	84,67	20,64
2	Bantul	301 986	153,49	15,89
3	Gunungkidul	243 847	148,39	20,83
4	Sleman	306 961	110,44	9,5
5	Yogyakarta	366 520	36,6	8,67
6	DIY	321 056	532,59	14,55

Sumber: BPS DI Yogyakarta, 2015. <http://yogyakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/6>

Jumlah penduduk miskin secara kewilayahan di Kota Yogyakarta dalam tahun 2017. Sebagaimana dalam Tabel B3, warganya terbagi dalam tiga kategori yaitu: rentan miskin, miskin, dan fakir miskin.

3. Penerima Manfaat

Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Rentan miskin (KS3)	Miskin (KS2)	Fakir Miskin (KS1)	Jumlah (Jiwa)
1	Ngampilan	1,339	370	0	1,709
2	Pakualaman	1,535	270	0	1,805
3	Gondomanan	1,345	777	7	2,129
4	Kotagede	2,171	472	0	2,643
5	Gedongtengen	2,195	788	6	2,989
6	Kraton	2,803	1,437	2	4,242
7	Danurejan	3,277	1,015	0	4,292
8	Mantrijeron	3,255	1,331	2	4,588
9	Wirobrajan	3,183	2,035	19	5,237
10	Jetis	3,911	1,571	6	5,488
11	Gondokusuman	4,445	1,187	0	5,632
12	Umbulharjo	4,674	1,292	1	5,967
13	Tegalrejo	4,747	1,684	4	6,435
14	Mergangsan	4,292	2,763	4	7,059
Jumlah		43,172	16,992	51	60,215

Jumlah penduduk peserta Program Keluarga Harapan Kota Yogyakarta Tahun 2016 sebanyak 12.822 Jiwa. Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin Kota Yogyakarta Tahun 2016 sebanyak 16.031 Jiwa. Tahun 2016 jumlah penerima santunan kematian bagi keluarga yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) di Kota Yogyakarta sebanyak 639 Jiwa. Data penerima bantuan keuangan khusus dari Gubernur dalam pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2015 sebanyak 2.551 Jiwa dengan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- (Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta; 2016).

Jumlah penerima Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta tercatat 17.635 jiwa. Agen penyalur bahan pangan

di Kota Yogyakarta berdasarkan database Dinas Sosial Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 122 agen dan tersebar di 52 Kelurahan. Mayoritas outlet penyalur bahan pangan berupa RPK berupa sembako, dan satu Koperasi. Penyaluran bantuan, outlet difasilitasi melalui Himbara termasuk penyediaan *Electronic Data Capture* (EDC).

Rumah Pangan Kita Amriyanudin berdiri awal tahun 2017 terletak di Kecamatan Wirobrajan, Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Ini merupakan Rumah Pangan Kita menjadi agen penyalur bantuan sosial yang di dirikan oleh Perum Bulog. Mitranya BNI 46 dikelola Bapak Agung Budi Hartanto. Penyalur bahan pangan ini menampung Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 360 KPM dari bagian Kecamatan Wirobrajan.

Rumah Pangan Kita Amriyanudin menyalurkan bantuan berupa beras, gula dan minyak. Bantuan beras disalurkan kepada KPM yang akan mendapat bantuan beras sejumlah 20 Kg, gula 1 Kg, dan minyak goreng 1 Lr. Selain penyaluran bantuan pangan, RPK Amriyanudin juga menyediakan jasa pembelian pulsa, pembelian token listrik, tiket kereta api dan pesawat. Tahun 2017 RPK Amriyanudin telah menyalurkan bantuan sebanyak dua kali penyaluran yaitu pada bulan Juli dan Agustus dan September. Penyaluran yang dilakukan seharusnya dilakukan setiap sebulan sekali. Tidak ada penyaluran sebelum bulan Juli, karena itu kegiatan penyaluran di rapel pada bulan Juli dan Agustus - September 2017.

C. Makassar

1. Gambaran Umum

Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir Pantai Barat bagian Selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat 119°, 18', 27', 97" Bujur Timur dan 5' 8', 6', 19" Lintang Selatan. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5–10 meter dari permukaan laut.

Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 Km² yang terbagi ke dalam 15 kecamatan dan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Adapun pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua kecamatan yaitu; Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau. Bagian dari gugusan pulau-pulau Sangkarrang atau disebut juga Pulau-pulau Pabbiring atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang letaknya paling jauh, pulau Langkai, Pulau Lumu-lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodigareng, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodigareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Laelae, Pulau Gusung, dan Pulau Kayangan yang terdekat.

2. Kependudukan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah, penduduk Kota Makassar tahun 2016 tercatat sebanyak 1.429.242 jiwa, yang mengalami kenaikan sekitar 20-an ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu laju pertumbuhan penduduk dalam tiga tahun terakhir antara 2014 - 2016 tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,40 %. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 98 %.

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Makassar 2014, 2015, dan 2016

No	Kecamatan	Jumlah penduduk			Laju pertumbuhan penduduk per tahun	
		2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2014-2016 (6)	2015-2016 (7)
1)						
1	Mariso	58327	58815	59292	0,82	0,81
2	Mamajang	60537	60779	61007	0,39	0,38
3	Tamalate	186921	190694	194493	2,01	1,99
4	Rappocini	160499	162539	164563	1,26	1,25
5	Makassar	84014	84396	84758	0,44	0,43
6	Ujung Pandang	28053	28278	28497	0,79	0,77
7	Wajo	30505	30722	30933	0,70	0,69
8	Bontoala	55937	56243	56536	0,53	0,52
9	Ujung Tanah	48531	48882	49223	0,71	0,70
10	Kep. Sangkarrang
11	Tallo	137997	138598	139167	0,42	0,41
12	Panakkukang	146121	146968	147783	0,57	0,55
13	Manggala	131500	135049	138659	2,69	2,67
14	Biringkanaya	190829	196612	202520	3,02	3,00
15	Tamalanrea	109471	110826	112170	1,23	1,21
	Kota Makassar	1429242	1449401	1469601	1,40	1,39

Sumber: BPS Kota Makassar (2017).

Penyebaran penduduk Kota Makassar padatahun 2016 dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Biringkanaya, yaitu sebanyak 202.520 atau hampir 14 % dari total penduduk Makassar, disusul Kecamatan Tamalate sebanyak 194.493, dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 28.497 jiwa. Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.634 jiwa/Km², disusul Kecamatan Mariso dengan kepadatan 32.578 jiwa/Km, Kecamatan Mamajang 27.114 jiwa/Km. Sedangkan Kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 3.523 jiwa/Km. Kemudian Kecamatan Biringkanaya 4.200 jiwa/Km, dan Kecamatan Manggala 5.744 jiwa/Km.

Tabel 6. Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga menurut Kecamatan di Kota Makassar, 2016

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga
1	Mariso	13.753	4
2	Mamajang	14.610	4
3	Tamalate	49.425	4
4	Rappocini	39.477	4
5	Makassar	19.234	4
6	Ujung Pandang	6.393	4
7	Wajo	6.746	5
8	Bontoala	12.518	5
9	Ujung Tanah	10.664	5
10	Kep. Sangkarrang
11	Tallo	30.930	4
12	Panakkukang	38.147	4
13	Manggala	31.392	4
14	Biringkanaya	49.059	4
15	Tamalanrea	35.706	3
16	Makassar	358.054	4

Sumber: BPS Kota Makassar, 2017.

Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di tiga kecamatan yaitu: Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala. Jumlah rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.2 memperlihatkan bahwa jumlah rumah tangga terbanyak yaitu pada Kecamatan Tamalate dengan jumlah rumah tangga sebanyak 49.425 rumah tangga dan jumlah rumah tangga yang terkecil yaitu pada Kecamatan Ujung Pandang yaitu 6.393 rumah tangga. Beberapa daerah lain tertinggi yaitu: Kecamatan Rappocini terdapat 39.477 rumah tangga, Kecamatan Wajo dengan 6.746 rumah tangga, Kecamatan Tallo dengan rumah tangga sebanyak 30.930 rumah tangga, dan Kecamatan Bontoala dengan rumah tangga sebanyak 12.518 rumah tangga. Keseluruhan jumlah rumah tangga wilayah tersebut tergolong jumlah rumah tangga yang jumlahnya relatif besar dibandingkan dengan jumlah rumah tangga kecamatan lainnya di Kota Makassar. Wilayah ini sekaligus sebagai wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin yang tertinggi.

3. Kondisi Kemiskinan Kota Makassar

Kota Makassar yang terus berkembang sebagai sentra perekonomian utama Indonesia bagian timur dihadapkan dengan tantangan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Kemiskinan menjadi satu persoalan serius yang dihadapi Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BPS (2017), jumlah penduduk miskin di Kota Makassar pada tahun 2016 mencapai 66.780 jiwa.

Tabel 7. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kota Makassar, 2009-2016

No	Tahun	Garis Kemiskinan (<i>Poverty Line</i>), dalam rupiah	Penduduk Miskin	
			Jumlah (000 orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	2009	209582	69,7	5,52
02	2010	233815	78,7	5,86
03	2011	242034	71,7	5,29
04	2012	256777	69,9	5,02
05	2013	273231	66,4	4,70
06	2014	281917	64,2	4,48
07	2015	321094	63,24	4,38
08	2016	347723	66,78	4,56

Sumber: BPS Kota Makassar (2017).

Kemiskinan di kota besar, khususnya kota Makassar kemungkinan dipicu oleh rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dasar ataupun pelatihan kerja bagi masyarakat yang berpendidikan rendah yang diikuti dengan sulitnya memenciptakan lapangan usaha sendiri yang mampu membantu ekonomi masyarakat miskin lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadikan banyak keluarga yang terperangkap di dalam lingkaran setan kemiskinan. Banyak anak-anak dari rumah tangga miskin yang tidak mampu mengenyam pendidikan bahkan pada level minimal, menjadikan masa kecil yang direnggut oleh beban ekonomi keluarga yang mengharuskan untuk bekerja mencari nafkah guna membantu keuangan keluarga.

Hal lain yang juga mempengaruhi tingkat pendapatan, berkaitan erat antara aspek pendidikan dan kesehatan di

dalam masyarakat, misalnya kesadaran untuk melakukan Program Keluarga Berencana, menjadikan jumlah anak dalam sebuah rumah tangga yang tidak terkontrol, sehingga membuat biaya tanggungan rumah tangga tersebut menjadi semakin tinggi. Kesehariannya, masyarakat yang tergolong miskin akan ditemukan pada pemukiman-pemukiman yang miskin pula. Di lingkungan tersebut ditemukan tingkat kesadaran terendah dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan demi berlangsungnya kehidupan yang sehat baik fisik maupun psikis agar dapat menjaga kemampuannya untuk mempertahankan faktor produksinya.

Tabel 8. Jumlah Kepala Keluarga Miskin yang Menerima Raskin menurut Kecamatan di Kota Makassar, 2016

Kode	Kecamatan	Sasaran Raskin (KK)	Perencanaan Beras (KG)
(1)	(2)	(3)	(4)
010	Mariso	1985	29775
020	Mamajang	1625	24375
030	Tamalate	7449	111735
031	Rappocini	4139	62085
040	Makassar	3933	58995
050	Ujung Pandang	485	7275
060	Wajo	433	6495
070	Bontoala	1535	23025
080	Ujung Tanah	2974	44610
081	Kep. Sangkarrang
090	Tallo	5714	85710
100	Panakkukang	4972	74580
101	Manggala	2857	42855
110	Biringkanaya	4211	63165
111	Tamalanrea	1905	28575
7371	Makassar	44217	663255

Sumber: BPS Kota Makassar (2017).

Berdasarkan sebaran penerima bantuan Raskin/Rastra, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kota Makassar terdapat di Kecamatan Tamalate dengan 7.449 jiwa. Disusul Kecamatan Tallo 5.714 jiwa, Kecamatan Panakkukang 4.972 jiwa, Kecamatan Biringkanaya 4.211 jiwa dan Kecamatan Rappocini 4.139 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan sasaran penerima raskin yang jumlahnya paling kecil di Kecamatan Wajo yaitu sebanyak 433 kepala keluarga.

Khusus untuk bantuan pangan nontunai, jumlah keseluruhan penerimanya berjumlah 39.795 keluarga terdiri dari PKH sebanyak 15.359 keluarga dan penerima Rastra sebanyak 24.436 keluarga. Penyaluran bantuan kepada keluarga, agen penyalur difasilitasi melalui Himbara yaitu BRILink termasuk dalam penyediaan *Electronic Data Capture* (EDC).

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Responden

1. Jenis Kelamin

Responden penelitian pada umumnya (96 %) terdiri dari kaum ibu dan selebihnya kaum laki-laki (4 %). Sebagai pengguna kartu merah putih terdiri dari kaum ibu karena namanya tercantum dalam kartu combo, ini kebijakan dari Kementerian Sosial. Kalaupun yang diwawancarai dalam terdapat kaum laki-laki, hanya sebagai pengganti pada saat ini kemungkinan isterinya berhalangan hadir.

Tabel 9. Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	6	4,00
2	Perempuan	144	96,00
Jumlah		150	100

Sumber: Penelitian, 2017

2. Umur

Responden penelitian berdasarkan umur dapat dibagi menjadi sembilan kelompok umur. Terlihat dalam Tabel R2, tersusun kelompok umur dengan jenjang lima tahunan. Termuda mulai berumur antara 20 – 25 tahun (0,70 %), dan tertua diatas 60 tahun (11,3 %).

Tabel 10. Umur Responden

No	U m u r	Jumlah	%
1	20 - 25	1	0,70
2	26 - 30	11	7,30
3	31 - 35	12	8,00
4	36 - 40	21	14,00
5	41 - 45	35	23,30
6	46 - 50	30	20,00
7	51 - 55	16	10,70
8	56 - 60	7	4,70
9	60 >	17	11,30
Jumlah		150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Kelompok umur tersebut menandakan, bahwa masih banyak keluarga muda yang ditandai dengan kelompok umur 20 tahun sampai dengan 40 tahun (29,40 %). Kemudian keluarga paroh baya dengan rentang 41 tahun sampai dengan 60 tahun jumlahnya lebih banyak (58,70 %). Berdasarkan pengamatan, mereka masih mempunyai tanggungan dua sampai tiga anak dan sewajarnya perolehan bahan pangan menjadi hal yang menguntungkan karen tinggal membeli lauk pauk.

Masih ada juga yang lanjut usia (11,30 %), mereka kebanyakan para janda yang mempunyai tanggungan keluarga. Biasanya mereka terdiri dari keluarga luas (*extended family*) yang tinggal dalam satu rumah, tetapi anggotanya kemungkinan lebih dari satu kepala keluarga. Tanggungan dari dirinya sendiri dan keturunannya seperti anak, mantu, dan cucunya. Oleh karena itu, wajar saja bantuan pangan yang diberikan dianggap membantu beban anggota keluarga. Sebab

anggota keluarga lain memenuhi bahan pangan atau keperluan lain dengan hasil kerja untuk dimakan bersama.

3. Pekerjaan

Sebagaimana dalam Tabel R4 jenis pekerjaan responden terbagi tiga. Pertama, sebagian besar ibu rumah tangga (76 %). Penerima bantuan pangan tercatat dalam kartu walet terdiri dari ibu-ibu atau ibu rumah tangga. Di kartu warna merah putih tersebut tertulis nama dan masa berlakunya, sehingga kaum ibu yang berhak mengambil bahan pangan. Kecuali ibu yang berhalangan, maka dapat diambil oleh suami atau anggota keluarga yang dewasa.

Tabel 11. Pekerjaan Responden

No	Jenis	Jumlah	%
1	Ibu rumah tangga	114	76,00
2	Wairausaha	20	13,30
3	Karyawan	1	0,70
4	Lainnya	3	8,70
5	Tidak menjawab	2	1,30
Jumlah		150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Kedua, wirasusaha (13,3 %) sebagian para ibu ada yang melakukan pekerjaan pokoknya seperti berdagang makanan dan minuman di warungnya, penjual kue keliling, dan bekerja membantu orang lain. Ketiga, lainnya yang dikerjakan memperoleh upah yang tidak tetap karena dilakukan kapan saja atau waktu tertentu. Seperti menjadi pencuci pakaian, dan produk jasa lainnya.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan identitas keluarga miskin yang biasanya berpendidikan rendah. Kemungkinan tersebut bisa dimaklumi sebagaimana dalam tabel berikut. Tertera dalam Tabel R3 tentang tingkat pendidikan terakhir terbagi empat tingkat.

Tabel 12. Pendidikan Terakhir Responden

No	Tingkat	Jumlah	%
1	Tidak sekolah	36	24,00
2	Tamat SD	58	38,70
3	Tamat SMP	21	14,00
4	Tamat SMA	33	22,00
5	Tidak menjawab	2	1,30
Jumlah		150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Pertama, Kebanyakan responden berpendidikan rendah yang terbagi dua yaitu; tidak sekolah (24 %), dan tamat Sekolah Dasar (38,70 %). Artinya lebih dari separoh ibu rumah tangga tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Alasan yang klasik tidak memiliki biaya, sehingga dianggap putus sekolah. Kondisi ini secara khusus mewarnai jenjang pendidikan masyarakat miskin dan menjadi permasalahan umum.

Selebihnya berpendidikan menengah yang hanya sampai tamat SMP (14 %) dan tamat SMA (22 %). Artinya ada beberapa keluarga penerima manfaat menamatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Biasanya mereka yang terdiri dari keluarga muda yang berumur kurang dari 35 tahun, ditandai dengan sepuluh tahun terakhir seseorang yang hidup di kota pasti mengenyam pendidikan di SMP dan SMA. Ujung-ujungnya tidak melanjutkan pendidikan karena ketiadaan biaya sekolah atau

kuliah. Dengan mudah mereka lebih dahulu berumah tangga atau mencari pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

B. Informan

Informan penelitian terbagi dua. Pertama, informan yang bersifat formal berjumlah lima sampai delapan orang. Mereka perlu diwawancarai sebagai aparatur negara atau pejabat yang menduduki jabatan tertentu pada instansi pemerintah. Seperti kepala bidang, kepala esksi, dan staf. Mereka pelaksana kebijakan pemerintah yang mengetahui tentang pelaksanaan bantuan pangan nontunai. Dengan demikian dari hasil diskusi atau wawancara informal, akan mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan di lapangan.

Kedua, informan di lingkungan lokasi terdiri dari tokoh masyarakat setempat. Diantaranya Ketua RT, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita. Mereka diwawancarai untuk memahami lebih dalam dan menajamkan keterangan terbawah terhadap pelaksanaan penyaluran bahan pangan. Kedudukan dalam masyarakat setempat sangat menentukan, terutama ketika terjadi masalah.

C. Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat

Penelitian ini hendak mengkaji faktor kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap BPNT dilihat dari 3 variabel: tujuan, manfaat, dan mekanisme atau prinsip umum. Ukuran kepuasan penerima manfaat dilihat dari puas atau tidak puas antara penerima rastra dan bantuan pangan nontunai.

1. Tujuan

Bantuan pangan bagi keluarga miskin tujuannya mengurangi beban pengeluaran untuk membeli bahan

makanan pokok. Khususnya bahan pangan secara nontunai diharapkan dapat memberi nutrisi yang seimbang kepada penerima manfaat.

Pemahaman terhadap pandangan kepuasan antara penerima bantuan tunai dan non tunai. Adapun penerima bantuan beras sejahtera menyatakan tidak puas (42,30 %) dan puas (58,70 %). Hal ini menunjukkan masih ada perasaan puas dengan cara yang lama dengan berbagai pertimbangan.

Tabel 13. Bantuan Memenuhi Kebutuhan Pangan

No	Pendapat	BPT	%	BPNT	%
1	Sangat Tidak Puas	24	16	-	-
2	Tidak Puas	38	25,30	2	1,30
3	Puas	46	30,70	78	52,00
4	Sangat Puas	42	28,00	70	46,70
Jumlah		150	100	150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Merasa puas karena:

- a. Aksesibilitas. Tempat pengambilan bantuan rastra relatif tidak jauh dari tempat tinggal penerima manfaat dan tidak direpotkan untuk mencari lokasi-lokasi pengambilan bahan pangan. Tentunya terdekat di kelurahan atau rumah Ketua Rukun Tetangga setempat,
- b. Ketepatan waktu. Penerima manfaat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan rastra. Bantuan pangan datang secara rutin pada rentang waktu yang ditetapkan.
- c. Antri dan waktu antrian dalam pengambilan bantuan. Penerima bantuan tidak perlu mengantri untuk

mendapatkan rastra, bahkan terkadang rastra dibawakan aparat desa langsung ke rumah. Kalaupun harus antri, waktunya tidak terlalu lama.

Adapun alasan tidak puas karena:

- a. Tidak tepat sasaran. Beras yang diterima dari kelurahan dibagi rata di tingkat dusun/lingkungan. Ada masalah *inclusion error* yang membuat banyak orang yang sebenarnya mampu justru mendapatkan rastra. Bahkan terkadang juga terdapat *exclusion error*, ternyata ada tidak semua orang miskin mendapatkan rastra.
- b. Kualitas. Kebanyakan kualitas beras dan kemasannya tidak bagus. Beras kualitasnya bervariasi dari bentuknya kecil dan sedang, bahkan ada beras yang tidak dapat dimakan atau dikonsumsi.

Secara umum bantuan pangan yang dibeli secara tunai mempengaruhi beban pengeluaran rumah tangga. Maksudnya beras yang diterima dapat dimakan bersama anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu biaya yang ada perlu untuk pengeluaran tambahan seperti lauk pauk, sayur, dan lain-lain.

Tabel 14 mereka yang membeli bahan pangan secara tunai lebih banyak menyatakan puas (64 %), menunjukkan bahan pangan sangat diperlukan dengan harga terjangkau sesuai kemampuan masing-masing. Sedangkan yang merasa tidak puas (26 %), ini disebabkan antara lain karena kualitas beras yang kadang-kadang kurang bagus. Beras yang diterima kualitasnya kurang baik, sehingga kadang-kadang nasinya terlalu keras atau sebaliknya diberi air lebih banyak menjadi bubur.

Tabel 14. Bantuan Mengurangi Beban Pengeluaran Kebutuhan Pangan Rumah Tangga

No	Pendapat	BPT	%	BPNT	%
1	Sangat Tidak Puas	11	7,30	-	
2	Tidak Puas	43	28,70	3	2,00
3	Puas	67	44,70	58	38,70
4	Sangat Puas	29	19,30	89	59,30
Jumlah		150	100	150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Saat ini bagi penerima bantuan pangan sebagian besar menyatakan puas (98 %). Dilihat dari dua hal yaitu; kualitas dan jumlahnya. Kualitas beras lebih baik karena termasuk kategori beras premium seharga Rp 110.000,- dan layak dimakan. Jumlah yang diterima sesuai dengan kebutuhan untuk satu kali pengambilan diperoleh 10 Kg atau 15 Kg. Jumlah ini dianggap masih layak untuk makan bagi keluarga yang beraggotakan 2 – 3 orang yang ikut makan dalam rumah tangga tersebut.

Pemenuhan gizi masih menjadi perhatian semua pihak. Pada umumnya keluarga tidak mempunyai pola asupan gizi yang seimbang, namun karena kebiasaan masing-masing. Sebagai gambaran pola makan yaitu: makan pagi dan makan malam. Pagi, biasanya anggota keluarga makan nasi seadanya dengan lauk pauk yang ada, bahkan ada yang tidak makan pagi. Makan siang, biasanya anggota keluarga makan di warung atau kantor dengan makan sesuai pilihannya. Makan malam bisa hampir sama dengan pola makan siang. Oleh karena itu dalam pemenuhan gizi seimbang masih menjadi pertimbangan keluarga masing-masing.

Tabel 15. Bantuan Memenuhi Gizi Seimbang

No	Pendapat	BPT	%	BPNT	%
1	Sangat Tidak Puas	27	18,00	-	-
2	Tidak Puas	67	44,70	6	4,00
3	Puas	39	26,00	88	58,70
4	Sangat Puas	17	11,30	56	37,30
Jumlah		150	100	150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Tertera dalam Tabel 15, bahwa ketika membeli pangan secara tunai yang diberi hanya beras, sehingga banyak yang menyatakan tidak puas (62,70 %) dan selebihnya puas (36,30 %). Lauk pauk atau sayuran dicari sendiri sebagai pemenuhan tambahan gizi.

Saat ini bagi penerima manfaat yang mendapat bantuan pangan secara nontunai, pada umumnya menyatakan puas (96 %), dan hanya sedikit yang tidak puas (4 %). Kepuasan tersebut didukung dengan diterimanya tiga jenis bahan pangan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Seperti gula digunakan untuk campuran minuman yang dapat merangsang kebutuhan makan. Demikian juga minyak goreng dapat digunakan untuk keperluan tambahan dalam menggoreng bahan makanan tertentu untuk kebutuhan anggota keluarganya. Bagi mefreka yang merasa tidak puas disebabkan bahan pangan yang diterima berupa barang. Ada yang ingin dalam bentuk uang, sehingga bisa digunakan untuk keperluan lain. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian bahan pangan.

Tabel 16. Kualitas Pangan Memenuhi Gizi Seimbang

No	Pendapat	BPT	%	BPNT	%
1	Sangat Tidak Puas	36	24,00	-	-
2	Tidak Puas	57	38,00	6	4,00
3	Puas	40	26,70	85	56,70
4	Sangat Puas	17	11,30	59	39,30
Jumlah		150	100	150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Ketepatan dalam menunjang tujuan penyaluran bahan pangan tunai dan nontunai dipengaruhi tiga aspek yaitu; kualitas bahan pangan, ketepatan sasaran, dan ketepatan waktu. Kualitas ketika bahan pangan dibeli secara tunai, banyak yang menyatakan tidak puas (62 %) dan yang puas (38 %). Kualitas beras tidak tentu kadang-kadang bagus dan kebanyakan berwarna kuning, bau, dan berketu. Walaupun yang merasa puas karena saat menerima bahan pangan kualitasnya bagus dan layak dimakan.

Saat ini penerima bahan pangan secara non tunai pada umumnya menyatakan puas (96 %) dan tidak puas (4 %). Kualitas barang lebih baik dan lebih banyak pilihan. Pilihan yang diberikan yaitu: beras, gula, dan minyak goreng. Beras yang disediakan kualitas premium yang dianggap layak dimakan. Masih ada beras yang dimasak tidak lembek, sehingga perlu disikapi dengan cara menambah air. Kalau masih bau ada yang menambahkan daun pandan sebagai pewangi nasi. Gula yang diterima dengan kualitas sedang karena agak coklat dan agak basah. Minyak goreng memadai untuk keperluan sesaat.

Penerima bahan pangan terdiri dari warga yang dikategorikan sebagai rumah tangga sangat miskin, sehingga

ketepatan sasaran menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terlihat pada Tabel 17, sewaktu bahan pangan dibeli secara tunai masih ada yang menyatakan tidak puas (48 %) dan separohnya lagi merasa puas (52 %).

Tabel 17. Bantuan Tepat Sasaran

No	Pendapat	BPT	%	BPNT	%
1	Sangat Tidak Puas	15	10,00	2	1,30
2	Tidak Puas	57	38,00	25	16,70
3	Puas	51	34,00	76	50,70
4	Sangat Puas	27	18,00	47	31,30
Jumlah		150	100	150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Ketepatan sasaran masih perlu dikaji ulang. Sebab ketika melakukan pengamatan terlihat secara fisik banyak penerima manfaat dalam masih segar, menggunakan pakaian bagus, dan memiliki kendaraan bermotor. Sementara masih ada yang melapor tidak kebagian KKS dan termasuk kategori fakir miskin, janda miskin, dan sebagainya. Ketidaktepatan sasaran. Ketepatan sasaran BPNT masih perlu diperdebatkan, khususnya karena persoalan ketepatan sasaran bisa berasal dari banyak hal dari makro hingga mikro. Pada satu kecamatan di Kota Makassar, calon penerima bantuan pangan dikumpulkan menjadi satu dengan dalih kesulitan akses ke tempat yang dituju karena berada di pulau yang agak jauh. Akhirnya beras yang ada dibagi rata kepada seluruh penduduk yang dianggap miskin.

Saat ini dengan cara nontunai, sasaran penerima bantuan bahan pangan agak lebih tepat karena berdasarkan data terbaru yang dievaluasi setiap semester dan tahunan. Akibatnya pasti

ada yang tidak dapat dengan alasan sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar, meninggal, pindah, dan sebagainya.

Jika dibandingkan antara pembelian beras secara tunai dan pengambilan bahan makanan secara nontunai, maka perlu dikaji aspek kegiatan yang semula diawali dengan pembelian beras murah yang dikenal dengan beras untuk masyarakat miskin. Sekarang ini berganti menjadi beras untuk keluarga sejahtera yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan berikutnya.

Terlihat dalam Tabel 18, waktu pembelian beras bantuan secara tunai masih lebih dari separoh menyatakan puas (55,30 %) dan tidak puas (44,60 %). Bagi yang merasa puas dengan alasan dianggap tepat waktu karena Ketua RT akan mendapat kabar dari petugas di lapangan tentang penyaluran pangan yang biasanya awal bulan. Keluarga hanya menunggu berita dari Ketua RT, sehingga ada yang menitip KKS atau memesan beras sesuai dengan kemampuan keluarga yang bisa dibayar di depan atau dibayar ketika beras diterima.

Tabel 18. Bantuan Tepat Waktu

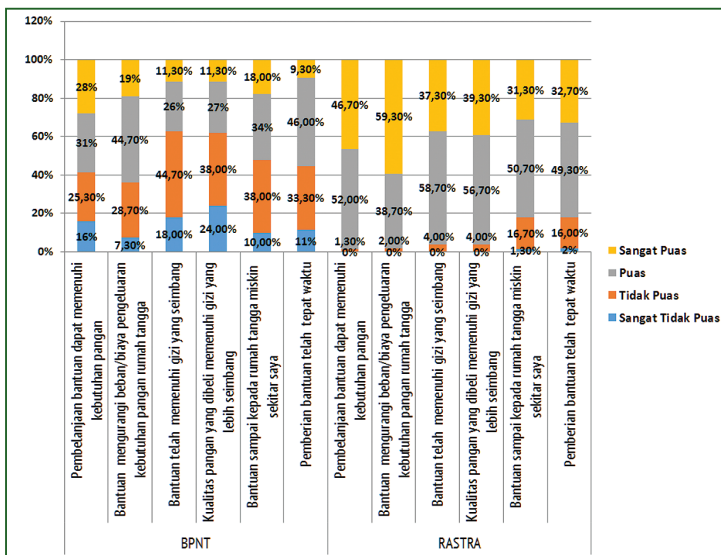
No	Pendapat	BPT	%	BPNT	%
1	Sangat Tidak Puas	17	11,30	3	2,00
2	Tidak Puas	50	33,30	24	16,00
3	Puas	69	46,00	74	49,30
4	Sangat Puas	14	9,30	49	32,70
Jumlah		150	100	150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Saat mulai berlaku pemberian pangan secara nontunai. Justru tidak terjadi karena seharusnya penyaluran bahan pangan dijadualkan dua bulan misalnya penyaluran bulan Januari dan Pebruari dilakukan pada bulan Pebruari.

Rencana penyaluran di Kota Palembang. Tahap pertama untuk Januari dan Pebruari 2017 sudah dilakukan, keluarga mendapat beras 20 Kg dan gula 4 Kg senilai Rp 220.000,-. Bulan Maret dan April tidak ada penyaluran atau ditunda karena Pemutakhiran Data Mandiri (MPM) atau menurut Bulog disebut renovasi. Empat bulan berikutnya tidak ada pelayanan pangan yaitu; Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September.

Grafik 1. Kepuasan Tujuan



Sumber: Penelitian, 2017

Tahap kedua direncanakan akhir bulan Agustus 2017 harus disalurkan. Sampai dengan pertengahan Oktober 2017, kenyataan secara bertahap pangan mulai dibagi tanggal 20 Oktober 2017 dan diharapkan sampai akhir Oktober 2017 sudah tersalurkan semuanya. Di Kecamatan Kertapati tanggal

21 Oktober 2017 ada dua agen BRILink yang menyalurkan bahan pangan. Agen atas nama Yuniarti menyalurkan bantuan pangan untuk 300 KPM. Tiap KPM mendapat tiga jenis bahan pangan yaitu; beras 15 Kg, gula 2 plastik (1 Kg), dan minyak goreng dua kemasan (1 Kg). Namun ada juga KPM yang tidak memiliki saldo dalam KKS.

Ketidaktepatan waktu penyaluran BPNT sering menjadi masalah. Di Kota Makassar, KPM baru menerima bahan pangan pertengahan Oktober 2017 untuk jatah Januari dan Februari 2017. Sebagian lagi ada yang menerima bulan Maret dan April 2017. Artinya KPM sebagai keluarga miskin harus berkorban untuk menutupi pengeluaran konsumsi rumah tangga selama beberapa bulan.

2. Manfaat

Manfaat bantuan pangan intinya yaitu; bahan pangan sebagai bentuk perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan, meningkatkan transaksi nontunai, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Manfaat sejak dimulainya pengambilan bahan pangan oleh penerima manfaat hanya terbagi dua. Pertama, mulai tahun 1998 ada sebagian keluarga penerima manfaat menerima kartu sebagai tanda memperoleh kesempatan membeli bahan pangan murah yang disebut raskin. Mulai tahun 2016 kartu tersebut diganti dengan karu walet yang berwarna merah putih yang diterbitkan Himbara. Saat pengambilan bahan pangan kartu tersebut dapat digunakan. Kedua, ada peserta PKH sejak tahun 2016 mendapat kartu sejenis yang dapat digunakan untuk pengambilan bahan pangan.

Tabel 19. Transaksi Kartu Lebih Mudah

No	Pendapat	BPT	%	BPNT	%
1	Sangat Tidak Puas	5	3,30	-	-
2	Tidak Puas	53	35,30	17	11,30
3	Puas	73	48,70	67	44,70
4	Sangat Puas	19	12,70	66	44,00
Jumlah		150	100	150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Berdasarkan Tabel M7 diatas, sewaktu membeli bahan pangan murah ada yang merasa tidak puas (38,60 %) dan puas (61,40 %). Waktu itu kartu tidak perlu digesek. Asalkan ditunjukkan kepada petugas yang menyalurkan bahan pangan, maka diperoleh bahan pangan sesuai dengan pembagian petugas. Bagi yang tidak puas menyatakan, bahwa kartu tidak ada gunanya karena beras yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima. Sedangkan yang merasa puas menyatakan, bahwa terpenting mendapat bagian berupa bahan pangan. Pendapat senada juga bagi keluarga yang tidak memiliki kartu, tetapi mampu membeli bahan pangan yang ada.

Saat penyaluran bahan pangan dilakukan secara tunai kartu walet sangat bermanfaat karena menentukan perolehannya. Pada umumnya keluarga menyatakan puas (88,70 %) dapat menggunakan kartu yang menjadi bukti dan hak dalam pemenuhan bahan pokok tersebut. Jelas peruntukannya dan jelas barang yang diterima. Sedangkan yang menyatakan tidak puas (11,30 %), disebabkan penggunaan kartu menjadi beban seperti masih harus antre, belum bisa menggunakan kartu, dan belum terbiasa.

Kondisi di lapangan menunjukkan, bahwa hampir semua keluarga penerima manfaat dibantu petugas dari agen untuk menggesek kartu yang akan memberi data dan keterangan masing-masing. Setelah dicetak akan menunjukkan ada atau tidaknya sejumlah dana yang tertera sebagai saldo. Jika ada saldo, maka penerima manfaat akan menerima haknya secara penuh berupa beras, gula, dan minyak goreng. Sebaliknya jika tidak ada saldo yang ditandai dengan tulis Rp 0,-, maka penerima manfaat kemungkinan “ter-block” oleh bank atau tidak mendapat lagi bantuan pangan.

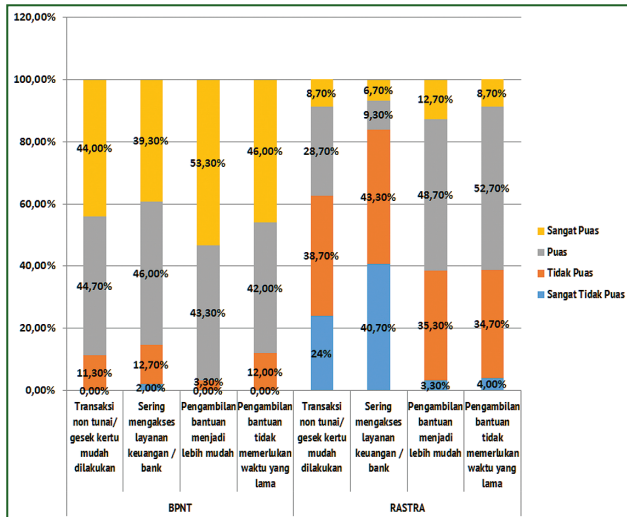
Kartu walet yang diterima sejak dicanangkan hanya digunakan dalam pengambilan bahan pangan di agen bank atau Warong-elektronik yang ditunjuk bank. Kartu tersebut tidak dapat digunakan melakukan transaksi di bank lain anggota Himbara. Menurut pedoman atau rencana ke depan, penerima manfaat dapat menggunakan kartu tersebut di mana saja dengan catatan masih dalam bank yang menjadi anggota perhimpunan tersebut.

Sewaktu pembelian bahan pangan secara tunai masih banyak yang menyatakan puas (61,30 %) karena antrian tidak terlalu lama. Bisa juga tidak perlu antri karena akan diantar oleh petugas ke rumahnya. Selebihnya merasa tidak puas (38,70 %) karena kadang-kadang harus antri dalam waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan pada saat yang sama banyak yang mengambil.

Saat ini dan berdasarkan pedoman bantuan pangan nontunai, bahwa penggunaan kartu walet akan memudahkan penerima manfaat bertransaksi. Kenyataannya saat pengambilan bahan pangan masih antri. Hal ini terjadi penerima manfaat seolah-olah menyerbu agen pengambilan

bahan pangan, sehingga antrian tidak dapat dihindari. Jadi penggunaan kartu kurang bermanfaat.

Grafik 2. Kepuasan Manfaat Bantuan Pangan Nontunai



Sumber: Penelitian, 2017

Pengalaman penelitian di Kota Semarang (Muhar, dkk; 2017), penerima manfaat tidak perlu antri terlalu lama karena tiap Warong-elektronik sudah dijatah melayani 300 – 500 KPM dan sudah ditentukan. Jadi KPM kapan saja bisa mengambil bahan pangan. Di agen bank tersebut semuanya tersedia, sehingga bisa membeli keperluan lain secara tunai. Asalkan tidak melewati batas waktu yang ditetapkan.

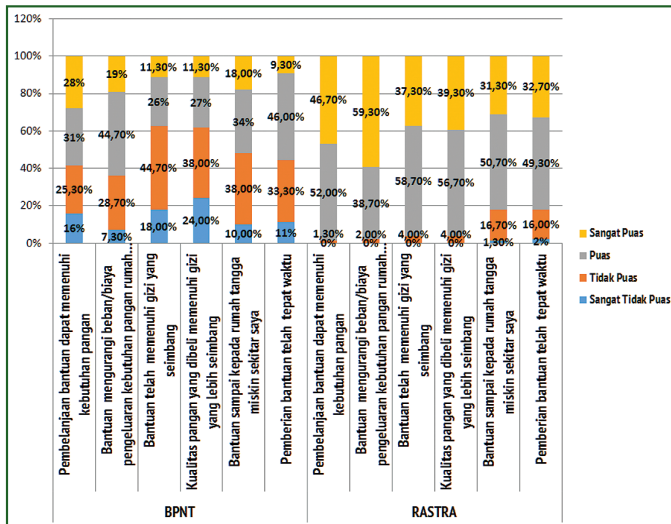
Di Kota Palembang, satu agen bank diserbu penerima manfaat. Kebetulan melayani hanya satu hari, targetnya mulai pukul sembilan sampai dengan pukul tiga sore. Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan belum selesai, sehingga antrian tetap ada. Hal ini terjadi antara lain; agen bank tersebut

mendapat jatah 300 paket untuk 300 KPM, KPM dari tempat yang jauh datang mengantri secara terus menerus, banyak KPM yang tidak bisa mengambil jatah karena “ter-block” dan harus ke kantor cabang bank BRI terdekat, dan ada yang pingsan.

3. Prinsip Umum

Secara mekanisme atau prinsip umum dalam pelaksanaan bantuan bahan pangan sesuai dengan prosedur. Khususnya persiapan dan pelaksanaannya. Persiapan sudah dilakukan dimulai dengan pendataan calon penerima manfaat dan penetapannya melalui Surat keputusan Menteri Sosial. Data tersebut dikirim ke bank yang akan membayarnya dan Perum Bulog yang akan mengadakan bahan pangan. Pelaksanaan di lapangan sudah disiapkan agen bank yang menjadi penyalur bahan pangan tersebut.

Grafik 3. Kepuasan Prinsip Umum



Mekanisme pelaksanaan terkait dengan lima aspek yaitu;

a. Jadwal Penyaluran

Tentang jadwal pengambilan bahan pangan terlihat di Tabel 20. Sewaktu pembelian bahan pangan secara tunai sebagian merasa puas (49,30 %) dan sebagian tidak puas (48,60 %). Puas karena waktu pembagian bahan pangan ditentukan, biasanya awal bulan. Petugas akan memberitahukan hari pengambilan bahan pangan, sehingga penerima manfaat memastikan untuk ikut antri atau menunggu antaran beras. Sedangkan bagi yang tidak puas, merasa waktu yang ditentukan tidak tepat atau kadang-kadang berubah.

Tabel 20. Jadwal Penyaluran Bantuan Jelas Waktunya

No	Pendapat	BPT	%	BPNT	%
1	Sangat Tidak Puas	14	9,30	1	2,00
2	Tidak Puas	59	39,30	16	12,70
3	Puas	63	42,00	78	46,00
4	Sangat Puas	14	9,30	55	39,30
Jumlah		150	100	150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Ada dua keterangan yang diperoleh. Pertama, sewaktu masih berlaku pembelian bahan pangan secara tunai keluarga penerima manfaat merasa puas (46%). Mereka hanya menerima beras yang diserahkan Ketua Rukun Tetangga dalam sesuai yang diserahkan. Menurut KPM, tidak dimasalahkan yang penting sanggup membeli sesuai kemampuan daya beli. Uang yang diperoleh digunakan untuk menebus beras yang diterima di kelurahan setempat. Di Palembang bantuan pangan tersebut disebut juga dengan beras miskin atau beras RT.

b. Jenis Bahan Pangan

Dilihat dari jenis bahan pangan yang diberikan dalam Tabel 21. Tentu pemberian bantuan secara tunai yang bisa dibeli hanya beras. Wajar saja sebagian besar (76 %) merasa tidak puas (34 %). Dibandingkan dengan dengan bantuan pangan secara tunai, pada umumnya merasa puas (96,70 %) karena keluarga mendapat tiga jenis. Hanya saja dalam prakteknya yang diterima sudah dalam bentuk paket yang terdiri dari: beras 15 Kg, gula 2 Kg, dan minyak goreng 2 Kg. Perubahan belum bisa dilakukan. Permintaan keluarga penerima manfaat antara lain; ada yang menginginkan semuanya berupa beras, ada juga yang meminta semuanya telur, dan kombinasi sesuai dengan keinginan. Hal ini belum bisa dilakukan karena dipastikan akan terjadi kekurangan satu bahan pangan dan bahan pangan lainnya berlebihan.

Selebihnya tidak puas (3,30 %) dengan alasan sebetulnya ada bahan pangan yang diperlukan seperti susu dan tepung. Kedua bahan pangan tersebut belum termasuk bahan pangan bagi keluarga miskin. Ada juga yang menginginkan bahan pangan lain seperti daging. Hal ini belum bisa dilakukan karena bahan pangan yang diberikan berupa paket yang sudah ditentukan.

Sedangkan yang merasa tidak puas (54 %) menyatakan, bahwa pembagian beras tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Satu keluarga seharusnya mendapat jatah 10 Kg/ keluarga/bulan, namun kenyataannya mereka mendapat jatah selalu kurang dari jumlah tersebut. Mengenai harga, bantuan pangan yang dibeli dianggap terjangkau dan memadai sesuai dengan daya beli semua yang merasa fakir dan miskin. Ada juga yang tidak berhak membeli beras tersebut karena dianggap sangat murah daripada membeli beras di kios atau pasar yang dianggap mahal.

Tabel 21. Bahan Pangan Disalurkan Sesuai Jumlahnya

No	Pendapat	BPT	%	BPNT	%
1	Sangat Tidak Puas	16	10,70	4	2,70
2	Tidak Puas	65	43,30	6	4,00
3	Puas	53	35,30	51	34,30
4	Sangat Puas	16	10,70	89	59,00
Jumlah		150	100	150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Saat ini dengan berlakunya bantuan bahan pangan tunai keluarga pada umumnya merasa lebih puas (96 %) karena mereka menerima bantuan setara dengan Rp 110.000,. Sementara dianggap memadai untuk satu keluarga kecil dengan jumlah 3 – 4 orang. Tentang harga, bantuan yang diberikan memadai karena jenis beras premium yang hampir sama dengan harga pasaran, gula pasir seharga Rp 12.500,-/kg dan harga pasaran tertinggi Rp 14.000,-/Kg, minyak goreng memadai sesuai harga pasar terbagi dua yaitu minyak curah seharga Rp 12.000,-/kg dan minyak dalam kemasan Rp 14.000,-/Kg.

Sedangkan yang merasa tidak puas (4 %) dengan alasan jumlah yang diterima selalu berbeda. Hal ini terjadi dua kemungkinan. Pertama, keluarga tidak secara rutin mengambil bahan pangan tersebut, sehingga terjadi penolakan di data yang seharusnya diambil semua sesuai periode. Kondisi ini, bahan pangan dianggap hilang. Kedua, keluarga hanya mendapat jatah periode tertentu dengan jumlah yang sama dengan periode sebelumnya.

c. Kualitas Bahan Pangan

Tentang kualitas bahan pangan. Sewaktu masih bisa dibeli secara tunai, kualitas bahan pangan tidak baik. Banyak

keluarga penerima manfaat merasa tidak puas. Beras yang dibeli tidak layak untuk dimakan, sehingga ada yang melakukan tukar tambah dengan beras yang lebih baik, beras bantuan dijual dan membeli beras yang sesuai dengan kebiasaan. Oleh karena itu keluarga penerima manfaat dalam keadaan terpaksa menerima bantuan tersebut.

Saat ini, bahan pangan secara nontunai kualitasnya tentu lebih baik. Semua dalam kualitas premium dengan harga biasa Rp 11.000,-/Kg, bahkan ada yang lebih tinggi dari harga tersebut. Pada umumnya merasa puas (96,70 %) mengaku kualitas bahan pangan yang diterima sudah baik dan layak dikonsumsi. Tetapi ada juga yang menginginkan gula dan minyak goreng diganti dengan telur. Memang di beberapa tempat terjadi perbedaan penyaluran bahan pangan dengan kombinasi tertentu, sehingga ada yang tidak sesuai dengan pedoman.

d. Agen Penyalur

Agen penyalur bahan pangan terbagi berdasarkan wilayah. Wilayah Sumatera dan Jawa agen penyalur bekerja sama dengan BRI dan BNI. Sebagian wilayah Jawa dan Bali agen penyalur bekerjasama dengan BNI dan BTN.

Di lokasi penelitian ada perbedaan. Kota Palembang terdapat tiga jenis agen penyalur bahan pangan. Pertama, terdapat 36 Agen BRILink merupakan penyalur bahan pangan yang bekerjasama dengan BRI Cabang Kota Palembang. Agen tersebut sudah menyalurkan bahan pangan tahap pertama dan tahap kedua. Di tiap kecamatan terdapat tiga sampai lima agen bank. Kedua, ada beberapa Warong-elektronik KUBe PKH dan warung lainnya yang bekerjasama dengan BNI Cabang Kota Palembang. Akan

tetapi agen tersebut belum bisa menyalurkan bahan pangan karena alasan administrasi dan teknis seperti belum ada ijin prinsip dan belum diberi mesin EDC. Ketiga, ada satu Rumah Pangan Kita (RPK) yang merupakan agen Perum Bulog yang menjual bahan pangan tertentu seperti beras, gula, dan teung terigu. Kios tersebut menjual bahan pangan dengan harga murah, terutama kepada masyarakat tergolong miskin. Kadang-kadang siapapun boleh membeli bahan kebutuhan rumah tangga tersebut.

Di Yogyakarta ada dua penyalur bahan pangan nontunai. Pertama, agen BNI yang telah menyalurkan bantuan bahan pangan nontunai. Agen tersebut menerima penyaluran bahan pangan dari penerima manfaat PKH dan Rastra. Kedua, ada RPK yang menjual bahan pangan untuk keluarga miskin secara tunai dan nontunai.

Di Makassar ada dua penyalur bahan pangan nontunai. Pertama, hanya agen BRILink yang sudah menyalurkan bahan pangan bagi penerima manfaat PKH dan Rastra. Kedua, sebenarnya sudah ada Warong-e KUBe PKH dan RPK. Namun kedua agen tersebut belum menyalurkan bahan pangan dengan alasan menunggu kebijakan dari pihak bank.

Tentang agen penyalur bahan pangan secara nontunai sudah mempunyai usaha perdagangan yang terdiri dari bahan pangan sejenis dan barang kebutuhan masyarakat lainnya. Ketika program bantuan pangan secara nontunai agen tersebut diikutsertakan dalam mendukung pelaksanaannya.

Tabel 22. Agen Menerima Usaha Eceran

No	Pendapat	BPT	%	BPNT	%
1	Sangat Tidak Puas	38	25,30	15	10,00
2	Tidak Puas	100	66,70	30	20,00
3	Puas	11	7,00	74	49,30
4	Sangat Puas	1	7,00	31	20,70
Jumlah		150	100	150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Secara ekonomi agen atau kios tersebut menampung barang kebutuhan yang diperoleh dari para distributor tertentu untuk barang-barang yang ada. Oleh karena itu agen juga menerima barang-barang yang dibuat masyarakat sekitarnya seperti makanan kecil, kerupuk, dan lain-lain.

Terlihat pada Tabel 22, bahwa pada umumnya responden yang tidak puas (82 %) terhadap agen tersebut karena bahan pangan harus dibeli secara kontan, harganya ada yang tidak terjangkau, dan yang dijual hanya barang tertentu. Selebihnya ada yang puas (18 %), maksudnya masyarakat masih ada yang mampu membeli barang-barang yang dijual di warung.

Sejak penyaluran bahan pangan secara tunai banyak yang menyatakan puas (70 %) karena mengetahui barang-barang yang dijual beraneka ragam dan ada yang didatangkan dari luar kelurahan dan banyak juga yang berasal dari penduduk setempat. Ini menandakan, bahwa agen sudah menampung barang-barang warga sekitarnya.

e. Kemudahan

Ketika masih menggunakan istilah beras untuk keluarga miskin ada yang menyatakan pengambilan pangan berupa

beras lebih mudah karena KPM hanya ke rumah Ketua RT. Kemudahan tersebut memunculkan sebutan: beras RT, beras Bulog, dan Raskin. Harga tebus Rp 1.600,-/Kg yang harus dibayar oleh KPM, seringkali terjadi ada KPM yang menerima beras yaitu: 3 Kg, 5 kg, 6 Kg, 8 kg, dan 10 Kg. Sesuai dengan kemampuan beli tiap KPM. Seharusnya menerima 10 Kg/KPM karena beras dibagi rata, terutama keluarga yang dianggap layak. Kemudahan dalam pengambilan karena dilakukan para Ketua RT. Keluarga pemegang KKS dan mengantri di rumah Ketua RT, mereka dipanggil satu persatu untuk memperoleh beras. Penerima boleh anggota keluarga karena saling mengenal, sehingga memudahkan pemberian yang sesuai dengan kemampuan dan jumlah anggota keluarga.

Tabel 23. Bantuan Memberi kemudahan Transaksi Perbankan

No	Pendapat	BPT	%	BPNT	%
1	Sangat Tidak Puas	47	31,30	2	1,30
2	Tidak Puas	73	48,70	5	3,30
3	Puas	26	17,30	90	60,00
4	Sangat Puas	4	3,70	53	35,30
Jumlah		150	100	150	100

Sumber: Penelitian, 2017

Pandangan responden waktu itu sebagian besar menyatakan tidak puas (80 %) karena menimbulkan berbagai kesulitan. Antara lain; harus mengeluarkan ongkos untuk mengangkut bahan pangan, bahan pangan yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima, dan masih banyak penerima manfaat yang tidak tercatat dalam basis data. Pengambilan bahan pangan sebagian agak jauh menggunakan kendaraan bermotor atau becak yang ditempuh selama 15 menit dengan jasa Rp 5.000,- sekali jalan, tetapi pulangnya lebih

mahal mencapai Rp 10.000,- karena membawa penumpang dan bahan pangan. Jarak terdekat sekitar 2 kilometer dengan jalan kaki ditempuh 15 menit, terjauh 4 kilometer ditempuh selama 30 menit dan kebanyakan menggunakan motor atau becak. Sedangkan yang menyatakan puas (20 %) berpendapat, bahwa mengalami kemudahan dalam mendapatkan bahan pangan karena rumahnya dekat dengan tempat pengambilan bahan pangan, dan selalu dibantu petugas.

Saat ini, pada umumnya menyatakan puas (95 %). Terutama bagi yang dekat dengan agen BRILink pengambilan pangan tidak mengeluarkan ongkos. Kemudahan dalam menggunakan kartu karena digesek pemilik BRILink, KPM tinggal menerima bahan pangan sesuai dengan saldo tersedia. Ada dua macam. Pertama, kebanyakan KPM memegang KKS dan mengantri di agen BRILink, sehingga yang dipanggil langsung memperoleh bahan pangan. Diutamakan orang lanjut usia di baris depan. Kedua, hanya sebagian yang menumpukkan KKS dipanggil sesuai dengan namanya. Hanya sebagian kecil yang diwakilkan anggota keluarganya terdiri atas suami atau anak-anaknya. Hanya beberapa responden yang menyatakan tidak puas (5 %) dengan alasan yang sama seperti diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sampai saat ini penyaluran bahan pangan menggunakan dua pola yaitu; penyaluran melalui subsidi beras sejahtera dan bantuan pangan nontunai. Terakhir akan diterapkan bantuan pangan nontunai yang akan diterima keluarga penerima manfaat berasal dari Non PKH dan PKH. Non PKH sebagai penerima manfaat hanya menerima bahan pangan nontunai. Peserta PKH mendapat tambahan bantuan pangan secara nontunai. Oleh karena itu akan diuraikan tentang kepuasan penerima bantuan pangan tunai dan nontunai.

1. Bantuan Tunai

Responden yang menyatakan puas. Pertama, bantuan dapat memenuhi kebutuhan hidup dirasakan puas (58,70 %), mengurangi beban pengeluaran puas (44,70 %), dan jadwal pengambilan sudah ditetapkan petugas. Selain itu bantuan sampai ke sasaran (50,70 %), walaupun ada yang mendapat sedikit, dan beras belum memenuhi gizi karena kualitas beras kurang baik. Kedua, sebagian ada yang menyatakan puas karena pengambilan bahan pangan menjadi lebih mudah (48,70 %), dan pengambilan bantuan tidak memerlukan waktu yang lama (52,70 %) karena diantar atau diberitahu petugas. Ketiga, Puas karena ada jadwal penyaluran (42 %) tiap bulan, dan bahan pangan yang disalurkan lebih banyak jumlahnya (35,30 %).

Sedangkan responden yang menyatakan tidak puas. Pertama, ada yang menyatakan tidak puas (16,70 %) karena beras yang diterima belum sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, dan agen belum banyak menerima barang eceran warga. Kedua, belum memberikan kemudahan dalam bertransaksi karena masih manual atau belum menggunakan kartu (43,30 %). Walaupun demikian pengambilan bahan pangan lebih mudah karena lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal (35,30 %).

2. Bantuan Nontunai

Responden yang menyatakan puas. Pertama, bahan pangan dianggap mengurangi beban pengeluaran (44,70 %) karena keluarga mencari lokasi terdekat, walaupun mengeluarkan biaya untuk beli bensin atau ongkos beca. Bantuan pangan disalurkan di saat yang tepat membutuhkan (46 %), kualitas pangan lebih baik (48 %), dan terdiri dari tiga jenis. Kedua, mulai menggesek kartu walet (44,70 %) yang dianggap model baru dan bisa mengakses layanan perbankan (46 %). Jika mengambil bahan pangan, maka akan dibantu pendamping atau agen asalkan menyebutkan PIN. Kualitas bahan pangan lebih baik termasuk jenis premium atau sedang. Ketiga, ada kemudahan untuk melakukan transaksi (60 %) karena ada beberapa daerah yang menetapkan waktu pengambilan dari pukul 08.30 - 17.00. Ada juga yang tidak menetapkan waktu, ketika bahan pangan habis barulah berhenti.

Sedangkan responden yang menyatakan tidak puas. Pertama, bantuan belum memenuhi gizi (44,70 %), sehingga ada keinginan untuk menggantinya dengan antara lain: susu atau daging. Selain itu pembagian waktu yang tidak sesuai waktunya (33,30 %) karena hanya tahap pertama lancar,

tahap kedua dan tahap keempat sampai akhir Oktober tidak lancar. Kedua, kandungan gizi belum sesuai karena ketiga bahan pangan tersebut menurut penerima manfaat tidak bisa dinilai kandungan gizinya. Banyaknya bantuan pangan belum mencukupi kebutuhan keluarga untuk satu bulan dan ada yang menyatakan satu bulan perlu 500 kg untuk empat orang anggota rumah tangga. Ketiga, penggunaan kartu hanya untuk pengambilan bahan pangan (12,70 %), belum memanfaatkan akses pelayanan perbankan, dan pengambilan bahan pangan tetap saja memerlukan waktu yang lama (12 %).

Penyaluran bahan pangan secara nontunai merupakan kebutuhan masa depan. Pelaksanaan di lapangan masih ditemukan beberapa masalah dan kendala karena masih dalam rangka uji coba tentunya ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Diantaranya; data di lapangan selalu bemasalah dengan istilah data PPLS 2011 dan PBDT 2015 yang menimbulkan perhatian dari bank, masih ada keluarga yang belum bisa menggunakan kartu kombo, dan jadwal waktu yang tidak tepat. Oleh karena itu semua pihak perlu mendukung kegiatan yang dimaksud dengan mengurangi berbagai resiko yang merugikan keluarga penerima manfaat.

B. Rekomendasi

Rekomendasi ditujukan kepada:

1. Kementerian Sosial

Di lapangan muncul data yang berbeda tentang keluarga penerima manfaat karena antara lain; semula mendapat jatah bahan pangan dan sekarang tidak menerima lagi, setelah dicek ternyata kartu walet tidak ada saldo alias kosong, ketidak tepatan waktu penyaluran karena bank beralasan data yang diterima berubah-ubah. Oleh karena

itu Kementerian Sosial harus mengirim penetapan penerima manfaat selain untuk bank diberikan juga kepada Dinas Sosial Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Secara administrasi penggunaan kartu walet dapat digunakan sebagai alat transaksi penyaluran bahan pangan secara nontunai. Hanya penyaluran bahan pangan perlu dijatah satu agen ditetapkan dengan jumlah sesuai pedoman 500 – 1.000 KPM.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah belum melakukan pemantauan tentang penyaluran pangan secara nontunai dengan alasan antara lain: sesuai Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai nomor 4.1.3 huruf d tertera pemerintah daerah secara aktif melakukan pemantauan dan pengendalian. Selain itu kartus diterbitkan oleh Himbara, maka tanggung jawab secara penuh masih di pihak bank yang ditunjuk sesuai dengan wilayah kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2017). Persentase Penduduk Miskin Maret 2017 Mencapai 10,64 persen. Biro Pusat Statistik. <https://bps.go.id/index.php/brs/1379>
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Cresswell, John W. (2012). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunarsa, Singgih D dan Gunarsa, Yulia S. (2004). *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Horton, P.B. & Hunt, C.L. (1987). *Sociology*, (Terjemahan: Aminuddin Ram dan Tita Sobari). Jakarta: Erlangga.
- Heri, Purwanto. (1998). *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Indrastuti, Dewi. (2017). "Sistem Pembayaran Tunai vs Nontunai" dalam *KOMPAS*, 31 Agustus, 7.
- Joe. (2017). "Alat Pembayaran Pengguna Nontunai Semakin Banyak" dalam *KOMPAS*, 20 Agustus, 7.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2017). *Pedoman Umum Subsidi Rastra*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial. (2017). "Laporan Utama" dalam *Societa*, edisi 1, 11 - 23.

- (2017). *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Sosial.
- Khudori. (2017). “Voucher Pangan dan Stabilisasi Beras” dalam *KOMPAS*, 8 Agustus, 7
- Kristianto, Tri Agung. (2017). *Alat Pembayaran Aman Tanpa Tunai*. Jakarta: KOMPAS. (8 Agustus 2017)
- Kuntjorowati, Elly. (2014). *Evaluasi Tingkat Kepuasan Penerima Manfaat Program Rastra*. Jogjakarta; B2P3KS.
- Martudji. (2017). *Bansos Non Tunai Efektif Dorong Kenaikan Indeks Keuangan Inklusif*. <https://nusantara.news/bansos-non-tunai-efektif-dorong-kenaikan-indeks-keuangan-inklusif/>
- Muhtar, dkk. (2017). *Kepuasan Penerima Manfaat Terhadap Bantuan Nontunai Melalui Warong-elektronik KUBe PKH*. Jakarta: Puslitbangkesos.
- Rakhmindyarto dan Syaifullah. (2017). *Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Keuangan%20Inklusif%20dan%20Pengentasan%20Kemiskinan.pdf>
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Jakarta: Lembaran Negara RI
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Jakarta: Lembaran Negara RI

- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jakarta: Lembaran Negara RI
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Lembaran Negara RI
- Saifudin, Azwar. (2005). *Sikap Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Setiawan, Hari Harjanto. (2017). "Paradigma Baru Bantuan Sosial" dalam *KOMPAS*, 31 Juli, 8.
- Sitepu, Anwar, dkk. (2014). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Raskin 2014*. Jakarta: Puslitbangkesos.
- Sitepu, Anwar. (2017). *Dari Raskin Menjadi Bantuan Pangan Nontunai*. Jakarta: UMJ Press.
- Supriyanto, RW., Ramdhani, ER., Rahmadan, E. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Kedepan*. Jakarta: Bappenas/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Soekanto. (2003). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press
- Soekidjo, Notoatmodjo. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, Edi. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Syauqi. (2017). *Policy Brief. Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai di Provinsi Lampung*. Jakarta: Biro Perencanaan Kementerian Sosial.

..... (2017). *Policy Brief. Bantuan Pangan Nontunai di Kota Denpasar Bali*. Jakarta: Biro Perencanaan Kementerian Sosial.

GALERI FOTO



Foto 1. Rumah Pangan Kita (RPK) AMRIYANUDIN



Foto 2. Beras yang disalurkan (5 Kg)



Foto 3. Gula yang Disalurkan (1Kg)



Foto 4. Minyak Goreng (1 Liter)

BIODATA PENULIS

ACHMADI JAYAPUTRA. Lahir di Takengon tanggal 2 November 1957.

Pendidikan; Tahun 1978 – 1984 mahasiswa Jurusan Antropologi FSUI; 1984 – 1986 kuliah jarak jauh dalam Ilmu Tauhid pada Universitas Islam Syekh Yusuf; 2000 – 2002 memperoleh kesempatan kuliah pada Program Pasca Sarjana kekhususan Pengembangan Masyarakat pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pekerjaan; Sejak tahun 1985 diterima sebagai pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI. Tahun 1986 - 1990 diangkat sebagai Asisten Peneliti Madya; 1990 – 1994 sebagai Ajun Peneliti Muda; 1994 – 1998 sebagai Ajun Peneliti Madya; 1998 – 2000 sebagai Peneliti Muda; 2000 – 2002 sebagai Peneliti Madya; 2002 – 2004 Ahli Peneliti Muda, mulai 2015 sebagai Peneliti Utama Bidang Pengembangan Masyarakat dan Ekonomi Lokal (31.16.01). Sejak tahun 1985 sampai sekarang mengajar mata kuliah Antropologi Sosial Budaya dan Sistem Budaya Indonesia di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Topik Penelitian yang pernah diikuti dan ditulis dalam lima tahun terakhir;

2012; Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Masyarakat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (P3KS Press), Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (P3KS Press), Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Rumah dan Lingkungan (P3KS Press), Dinamika Masyarakat Mimika dalam Perspektif Ketahanan Sosial (Informasi), Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Warga Miskin di Kota Padang (Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial), Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Studi Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Perkotaan (P3KS Press), Keragaman Suku Bangsa dan Pranata Sosial Masyarakat Indonesia (UMJ Press),

Arah Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pulau Morotai (UMJ Press).

2013; Evaluasi Program Bedah Kampung (P3KS Press), Pedoman Kerja Tim Penilai Peneliti Kementerian Sosial (Puslitbangkesos), Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Bedah Kampung (P3KS Press), Evaluasi Program Keserasian Sosial dalam Penanganan Konflik Sosial (P3KS Press).

2014; Aspek Kesejahteraan Sosisl di Kelurahan Johar, Baru Jakarta Pusat (UMJ Press), Evaluasi Program Bedah Kampung (Jurnal Litkesos), Studi Kasus Hubungan Sosial dalam Komunitas Orang Aceh di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (Informasi).

2015; Evaluasi Ke bijakan pemberdayaan Sosial Bagi Peserta Program keluarga Harapan melalui Kelompok Usaha Bersama (Puslitbangkesos), Kesiapan Perusahaan dalam Menerima Tenaga Kerja Penyandang Diabilitas. Kasus di Provinsi Jawa Barat (UMJ Press), Kebutuhan dan Aspirasi Penyandang Disabilitas (Puslitbangkesos).

2016; Kemiskinan (Mahara Publishing), Tantangan Profesi Peneliti: Satu Studi Kasus Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Socio Informa, Volume 2, Nomor 1).

AYU DIAH AMALIA. Lahir di Jakarta, tanggal 6 Pebruari 1983. Menamatkan pendidikan tinggi sebagai Sarjana Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia (2000). Tahun 2001 diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial. Awal karirnya sebagai Peneliti Pertama, namun karena melanjutkan pendidikan program Magister Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia dan harus diberhentikan sementara. Mulai tahun 2013 diangkat kembali dan menambah angka kredit menjadi Peneliti Muda.

Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan antara lain; Pelaksanaan Program Elderly Day Care Services di Panti Sosial Tresna Wredha Budhi Dharma Bekasi (2013), Dampak Perubahan Struktur

Keluarga terhadap lanjut usia (2013), Kesepaian dan Isolasi Sosial: ditinjau dari Perspektif Sosiologis (2014), Evaluasi outcomes program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna, Bandung (2014).

MOCHAMAD SYAWIE. Lahir di Pekalongan tanggal 10 Mei 1955. Tahun 1982 sebagai alumni dari Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tahun 1992 melanjutkan pendidikan magister pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Tahun 1984 sampai dengan 1987 bekerja di Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Lampung. Kemudian tahun 1988 - 1994 pindah ke Balai Besar Penelitian, Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) di Jogjakarta. Pengalaman Mengajar yang telah dilakukan yaitu Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dimulai (1995 - 2014), pengajar di STIE IBII Jakarta (1998 - 2001). Kemudian diangkat sebagai Peneliti Madya pada Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Departemen Sosial RI. Saat ini sebagai Peneliti Utama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sos RI. Berbagai penelitian sudah pernah dilakukan dan diterbitkan dalam bentuk Buku maupun Jurnal Ilmiah. Pengalaman lainnya, sebagai dewan Redaksi Jurnal Ketahanan Sosial Masyarakat tahun 2004 - 2010, serta anggota Tim Penilai Peneliti Instansi Kementerian Sosial RI (2009-2014).

BAMBANG PUDJIANTO. Lahir di Jakarta tanggal 11 Oktober 1967. Tahun 1991 memperoleh gelar Sarjana Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, lalu 2001 memperoleh kesempatan belajar di Jurusan Psikologi Sosial pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Tahun 1995 sampai dengan 1997 mengajar di Perguruan Tinggi Bina Sarana Informatika Jakarta. Mulai tahun 1994 hingga saat ini mengabdikan diri di Kementerian

Sosial RI, sebagai Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan berbagai kondisi kehidupan sosial di masyarakat dan di lembaga sosial, serta beberapa karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah. Selain itu, pernah bergabung beberapa tahun sebagai dewan redaksi majalah dan jurnal Puslitbangkesos.

MUHTAR. Lahir di Magetan, tanggal 31 Agustus 1960. Pendidikan tinggi dari Pasca Sarjana (S2) Program Studi Sosiologi Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial (FISIP-UI, 2004). Mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sumatera Selatan (1991). Tahun 1996 pindah ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Sejak itu ikut serta dalam kegiatan penelitian bidang kesejahteraan sosial, dan sejak tahun 2000 sebagai Peneliti Muda. Topik-topik penelitian yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir, antara lain: Perlindungan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (2014); Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten/ Kota Sejahtera (2015). Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu: Pengembangan Keterpaduan Layanan Dasar (2016). Saat ini anggota dewan redaksi Majalah Jurnal Sosio Konsepsia, Puslitbangkesos.

M. BELANAWANE SULUBERE. Lahir di Jakarta, tanggal 8 Oktober 1983. Pendidikan tinggi dari Jurusan Antropologi FISIP UI (2006). Tahun 2010 mulai bergabung sebagai staf di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Akhir tahun 2013 menjadi pejabat Peneliti Pertama di lembaga tersebut. Mulai mengikuti beberapa penelitian di bidang kesejahteraan sosial dan menulis artikel dalam majalah di kampus dan lembaganya sendiri.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, dalam tahun 2017 telah melakukan berbagai penelitian tentang kemiskinan. Hanya saja dalam dua tahun terakhir ini semua penelitian cepat (*quick research*). Pelaksanaannya dilakukan sekitar tiga bulan dengan catatan pengumpulan data lapangan memerlukan waktu seminggu. Penelitian yang menghasilkan laporan ringkas digunakan untuk keperluan kebijakan yang memerlukan data dan informasi secara cepat terhadap pelaksanaan program yang sedang berjalan. Diantaranya bantuan tunai dan bantuan nontunai. Kelompok sasaran memperoleh bantuan dari pemerintah berupa bahan pangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara penerima bantuan dengan bahan pangan yang diterima. Dilihat dari kepuasan diantaranya keluarga mulai diperkenalkan dengan sistem perbankan dengan kartu, jumlah bahan pangan yang diterima banyak pilihan, dan mutu bahan pangan semakin baik, sehingga memiliki nilai yang bagus untuk ditulisa sebagai buah pikiran dan analisis kondisi di lapangan. Ada juga yang menyatakan tidak puas karena merasa sulit dengan cara yang dilakukan, dan waktu pembagian bahan pangan tetap lama dan antri.



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang, Jakarta Timur. Telp (021) 8017126
Website: www.puslit.kemsos.go.id E-mail: puslitbangkesos@kemsos.go.id